

Outlook Industri Sawit Indonesia Q2 2026

Disrupsi Geopolitik dan Ketahanan Industri
Sawit di Tengah Dorongan Transisi Energi

Maret 2026



Outlook Industri Sawit Indonesia Q2 2026

Disrupsi Geopolitik dan Ketahanan Industri
Sawit di Tengah Dorongan Transisi Energi

Maret 2026



KATA PENGANTAR

Memasuki kuartal kedua tahun 2026, industri kelapa sawit Indonesia menghadapi dinamika yang semakin kompleks dan saling terhubung. Di satu sisi, sawit tetap memainkan peran strategis bagi perekonomian nasional melalui kontribusinya terhadap devisa ekspor, pasokan bahan baku industri, ketahanan energi, dan penghidupan jutaan petani. Namun di sisi lain, perkembangan pasar sawit pada periode ini semakin dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor fundamental domestik dan tekanan eksternal, mulai dari perubahan pola iklim, penguatan permintaan biodiesel, volatilitas harga energi, hingga dinamika perdagangan dan geopolitik global.

Outlook Sawit Q2 2026 ini disusun sebagai kelanjutan dari pembacaan industri sawit nasional pada level tahunan, dengan fokus khusus pada periode April–Juni 2026 serta implikasinya terhadap semester pertama tahun berjalan. Dokumen ini bertujuan memberikan gambaran analitis yang lebih terarah mengenai kondisi supply-demand, prospek produksi, dinamika konsumsi domestik, arah ekspor, dan perkembangan stok, sekaligus menelaah bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dengan perubahan iklim, pergerakan harga CPO, kebijakan fiskal melalui Harga Referensi, Pungutan Ekspor, dan Bea Keluar, serta perkembangan perdagangan dan geopolitik global yang semakin relevan terhadap industri sawit.

Secara umum, Q2 2026 menunjukkan karakteristik sebagai fase penyesuaian yang penting. Dari sisi pasokan, produksi nasional masih relatif terjaga, namun menghadapi tekanan akibat proses pemulihan pascabanjir di sejumlah sentra produksi serta mulai munculnya sinyal transisi menuju musim kering. Dari sisi permintaan, konsumsi domestik tetap kuat dengan biodiesel sebagai penopang utama, sementara ruang ekspor menghadapi tantangan dari semakin ketatnya keseimbangan pasar dan meningkatnya ketidakpastian global. Dalam situasi tersebut, pergerakan harga CPO menjadi semakin sensitif terhadap dinamika energi dan geopolitik, sehingga implikasinya tidak hanya dirasakan pada pasar ekspor, tetapi juga pada kebijakan domestik dan stabilitas pasar dalam negeri.

Outlook ini juga menempatkan industri sawit Indonesia dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari sistem pangan, energi, dan perdagangan global yang sedang mengalami perubahan. Karena itu, pembacaan terhadap Q2 2026 tidak cukup dilakukan hanya dari sisi pasar jangka pendek, tetapi perlu pula dikaitkan dengan persoalan struktural yang akan menentukan daya tahan industri ke depan. Dalam hal ini, perkembangan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi salah satu aspek penting yang turut diperhatikan, mengingat produktivitas kebun rakyat akan sangat menentukan kapasitas pasok nasional dalam jangka menengah.

Dokumen ini disusun oleh tim analis IPOSS secara kolaboratif dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, sehingga diharapkan mampu memberikan pembacaan yang lebih utuh, kontekstual, dan relevan. Kami berharap Outlook Sawit Q2 2026 ini dapat menjadi referensi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam memahami arah perkembangan industri sawit Indonesia, sekaligus dalam merumuskan respons kebijakan dan strategi yang lebih adaptif di tengah dinamika yang terus berubah.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Outlook Sawit Q2 2026 dapat memberikan manfaat nyata sebagai bahan analisis, refleksi, dan pertimbangan strategis bagi penguatan industri sawit Indonesia yang produktif, tangguh, dan berkelanjutan.

Pengurus IPOSS



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Outlook Q2 2026	2
1.3 Struktur dan Integrasi Analisis.....	2
1.4 Kerangka Besar Outlook Q2 2026.....	3
BAB 2. OUTLOOK SUPPLY-DEMAND Q2 2026	6
2.1 Outlook Produksi Q2 2026.....	6
2.2 Outlook Konsumsi Q2 2026.....	8
2.3 Outlook Ekspor Q2 2026.....	10
2.4 Outlook Stok Q2 2026	11
BAB 3. OUTLOOK IKLIM DAN DAMPAKNYA TERHADAP PRODUKSI SAWIT	14
3.1 Dinamika Iklim: Transisi Menuju Fase Musim Kering.....	14
3.2 Implikasi terhadap Produksi Sawit Q2 2026	15
3.3 Proyeksi Spasial Musim Kemarau Q2 2026 dan Implikasinya terhadap Produksi Sawit.....	16
3.4 Strategi Antisipasi Musim Kering.....	18
BAB 4. OUTLOOK HARGA CPO Q2 2026	22
4.1 Harga CPO Global.....	22
4.2 Harga CPO Domestik.....	23
4.3 Dampak Krisis Energi terhadap Harga Minyak dan CPO.....	24
BAB 5. OUTLOOK PUNGUTAN EKSPOR DAN BEA KELUAR SAWIT Q2 2026	27
5.1. Proyeksi Harga Referensi Q2 2026.....	27
5.2. Identifikasi Pungutan Ekspor dan Bea Keluar dari Proyeksi Harga Referensi	28
5.4 Implikasi terhadap Harga TBS dan Posisi Petani	31
5.5 Implikasi terhadap Pasar Domestik dan Stabilitas Harga Minyak Goreng	32
BAB 6. SAWIT INDONESIA DALAM DINAMIKA PERDAGANGAN DAN GEOPOLITIK GLOBAL	34
6.1. Peluang Pasar Sawit Indonesia Pasca Agreement on Reciprocal Trade (ART)	34
6.2 Dampak Kenaikan Harga Crude Oil terhadap Pengurangan Insentif Biodiesel	36
6.3. Tantangan Struktural Program Biodiesel di Tengah Ketidakpastian Geopolitik	37
BAB 7. OUTLOOK PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR).....	42
7.1 Posisi Strategis PSR dalam Keberlanjutan Industri Sawit	42
7.2 Kinerja Program PSR secara Nasional	42
7.3 Sebaran Wilayah dan Disparitas Implementasi PSR.....	44
7.4 Perkembangan PSR pada Semester I 2026	45
7.5 Outlook Capaian PSR Q2 2026 dan Strategi untuk Mencapainya	46
7.6 Implikasi Strategis PSR terhadap Outlook Sawit Indonesia.....	47
BAB 8. PENUTUP	51
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Antisipasi Musim Kemarau 2026 terhadap Sektor Kelapa Sawit	18
Tabel 2. Rangkuman HR, PE, dan BK Q2 2026	30
Tabel 3. Perbandingan Tarif Impor Minyak Nabati di Pasar Amerika Serikat dari Eksportir Utama	34
Tabel 4. Estimasi Kebutuhan Bahan Baku Biodiesel pada Skenario B40 dan B50	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Produksi CPO dan CPKO s.d. Q2	6
Gambar 2. Produksi Nasional Q2 Year on Year – YoY	7
Gambar 3. Konsumsi Domestik Minyak Sawit Indonesia pada Q2	8
Gambar 4. Skenario I dan II Alokasi Konsumsi Domestik Minyak Sawit Indonesia pada Q2 2026	9
Gambar 5. Ekspor Produk Sawit Nasional Q2	10
Gambar 6. Stok Akhir Minyak Sawit Q1-Q2 2026	11
Gambar 7. Model Prediksi Iklim 2026	14
Gambar 8. Wilayah dengan Awal Musim Kemarau Lebih Awal dari Normal	16
Gambar 9. Proyeksi Wilayah dengan Puncak Musim Kemarau 2026	17
Gambar 10. Durasi dan/atau Sifat Musim Kemarau 2026	17
Gambar 11. Harga Aktual dan Proyeksi CPO Global	22
Gambar 12. Harga Aktual dan Proyeksi CPO Domestik	23
Gambar 13. Proyeksi Q2 2026 untuk Harga Referensi CPO	28
Gambar 14. Perkembangan Tarif PE CPO Semester I 2026	29
Gambar 15. Klasifikasi Pos Tarif BK CPO	29
Gambar 16. Volume Ekspor Sawit Indonesia ke Amerika	35
Gambar 17. Tren Perbandingan HIP Biodiesel dan Solar	37
Gambar 18. Neraca Massa Konversi CPO menjadi Biodiesel (FAME)	38
Gambar 19. Perbandingan Komposisi Luas dan Produksi CPO	42
Gambar 20. Akumulasi Kinerja Program Peremajaan Sawit Rakyat	43
Gambar 21. Total Realisasi PSR Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2026	44
Gambar 22. Progress Perkembangan PSR s.d Februari 2026	45
Gambar 23. Outlook PSR Per Provinsi Q2 2026	47



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki triwulan kedua tahun 2026 (Q2 2026), industri kelapa sawit Indonesia berada pada titik yang semakin ditentukan oleh interaksi antara faktor fundamental domestik dan tekanan eksternal global. Sawit tetap memegang peran strategis bagi perekonomian nasional melalui kontribusinya terhadap devisa ekspor, pasokan bahan baku industri, ketahanan energi, dan penghidupan jutaan petani. Namun, pada saat yang sama, ruang kebijakan dan ruang pasar yang tersedia bagi industri ini menjadi semakin sempit karena perubahan pada sisi produksi, konsumsi domestik, harga energi, serta arah perdagangan internasional.

Dari sisi fundamental pasar, Q2 2026 ditandai oleh kecenderungan *supply-demand* yang lebih ketat dibandingkan periode sebelumnya. Produksi nasional diperkirakan menghadapi koreksi moderat akibat belum sepenuhnya pulihnya sejumlah sentra produksi dari gangguan hidrologis pada akhir 2025, sementara konsumsi domestik tetap tinggi dengan biodiesel sebagai penopang utama. Dalam kondisi seperti ini, perubahan kecil pada produksi, ekspor, atau serapan domestik dapat lebih cepat memengaruhi stok dan harga, sehingga pembacaan terhadap keseimbangan pasar perlu dilakukan secara lebih cermat.

Di luar faktor fundamental, prospek Q2 2026 juga dipengaruhi oleh transisi iklim yang penting. Berakhirnya fase basah pada awal tahun membuka peluang pemulihan operasional kebun di sebagian wilayah, tetapi pada saat yang sama muncul sinyal kemarau yang lebih dini dan lebih kering di sejumlah sentra sawit. Artinya, industri tidak hanya menghadapi dampak lanjutan dari banjir sebelumnya, tetapi juga mulai memasuki fase kewaspadaan baru terhadap defisit air, penurunan produktivitas, gangguan pemupukan, serta risiko operasional yang lebih tinggi pada semester berikutnya.

Tekanan eksternal juga semakin menegaskan bahwa pasar sawit Indonesia tidak lagi dapat dibaca semata-mata dari variabel komoditas tradisional. Pada Q2 2026, pasar global dipengaruhi oleh **eskalasi perang di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat**, yang meningkatkan risiko terhadap pasokan energi, jalur distribusi strategis, dan stabilitas logistik global. Kenaikan harga energi akibat konflik tersebut memperkuat harga CPO melalui jalur substitusi energi dan peningkatan biaya distribusi, tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan ketidakpastian margin industri, terutama ketika direspons oleh instrumen domestik seperti Harga Referensi, Pungutan Ekspor (PE), dan Bea Keluar (BK).

Apabila perang ini meluas atau berlangsung berkepanjangan, dampaknya dapat menjalar lebih jauh ke pasar komoditas global dan meningkatkan risiko perlambatan ekonomi dunia yang disertai tekanan inflasi. Dalam skenario seperti itu, pasar sawit akan semakin sensitif bukan hanya terhadap faktor supply-demand, tetapi juga terhadap dinamika perang, energi, dan stabilitas ekonomi global.

Dalam konteks nasional, situasi tersebut memperkuat relevansi kebijakan biodiesel sebagai instrumen ketahanan energi, sekaligus membuka pertanyaan tentang kesiapan struktural industri. Wacana percepatan menuju B50 dapat meningkatkan serapan domestik dan memperketat pasar CPO, tetapi implementasinya juga berhadapan dengan tantangan bahan baku penolong dan struktur industri pendukung yang belum sepenuhnya mandiri. Pada saat yang sama, tantangan jangka menengah seperti rendahnya capaian Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menunjukkan bahwa persoalan produktivitas belum terselesaikan dan tetap akan menentukan daya tahan pasokan nasional ke depan.

Dengan demikian, Outlook Q2 2026 perlu dibangun bukan hanya sebagai pembacaan jangka pendek atas harga dan volume, melainkan sebagai analisis yang menghubungkan neraca pasar, risiko iklim, dinamika kebijakan, tekanan geopolitik, konflik Iran-Israel-AS, dan tantangan struktural industri. Atas dasar itulah dokumen ini disusun untuk membaca arah pasar sawit pada Q2 2026 secara lebih utuh, mengidentifikasi titik-titik risiko utama, serta memberikan dasar analitis bagi respons kebijakan dan strategi pelaku industri.

1.2 Tujuan Penyusunan Outlook Q2 2026

Outlook Sawit Q2 2026 disusun sebagai instrumen analisis strategis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai arah perkembangan industri kelapa sawit Indonesia pada periode April–Juni 2026. Dokumen ini dimaksudkan untuk membantu pembaca memahami bagaimana perubahan pada sisi fundamental pasar, iklim, harga, kebijakan, dan dinamika global saling berinteraksi dalam membentuk kondisi industri pada semester pertama 2026.

Secara lebih spesifik, tujuan penyusunan Outlook ini adalah untuk:

1. Menyusun proyeksi fundamental pasar sawit, yang mencakup produksi, konsumsi domestik, ekspor, dan stok CPO sebagai dasar pembacaan keseimbangan supply–demand pada Q2 2026.
2. Mengidentifikasi pengaruh dinamika iklim dan transisi menuju musim kering terhadap prospek produksi sawit, risiko operasional kebun, serta sensitivitas pasokan nasional.
3. Menganalisis arah pergerakan harga CPO, baik di pasar global maupun domestik, dengan mempertimbangkan interaksi antara faktor fundamental, harga energi, nilai tukar, dan ekspektasi pasar.
4. Mengkaji implikasi kebijakan fiskal dan perdagangan, khususnya yang berkaitan dengan Harga Referensi CPO, Pungutan Ekspor (PE), dan Bea Keluar (BK), terhadap daya saing ekspor, harga domestik, dan transmisi manfaat di sepanjang rantai pasok.
5. Menelaah pengaruh dinamika perdagangan dan geopolitik global, termasuk peluang pasar pasca *Agreement on Reciprocal Trade* (ART) serta risiko gangguan energi dan logistik, terhadap posisi sawit Indonesia di pasar internasional.
6. Menilai perkembangan program strategis nasional, terutama Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dalam kaitannya dengan keberlanjutan produksi, produktivitas, dan kapasitas pasokan jangka menengah.
7. Merumuskan implikasi strategis dari keseluruhan dinamika tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merespons perkembangan industri sawit pada Q2 2026.

Dengan tujuan tersebut, Outlook Sawit Q2 2026 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen proyeksi, tetapi juga sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang berbasis data dan analisis terintegrasi, sehingga dapat digunakan untuk membaca arah pasar, memahami sumber risiko, dan merumuskan respons yang lebih adaptif serta terukur.

1.3 Struktur dan Integrasi Analisis

Outlook Sawit Q2 2026 disusun dengan pendekatan analisis yang terstruktur dan terintegrasi, dengan menempatkan industri sawit sebagai sebuah sistem yang dipengaruhi oleh hubungan timbal balik antara faktor fundamental pasar, kondisi iklim, pembentukan harga, instrumen kebijakan, dan dinamika global. Melalui pendekatan ini, perubahan pada satu variabel tidak dibaca secara terpisah, tetapi ditelusuri implikasinya terhadap keseluruhan konfigurasi pasar sawit.

Secara struktural, analisis dimulai dari pembacaan neraca supply–demand yang menjelaskan ruang pasok, serapan domestik, ekspor, dan stok. Namun, pembacaan fundamental tersebut tidak berdiri sendiri, karena sejak awal dihubungkan dengan faktor iklim yang memengaruhi performa produksi dan

risiko pasokan. Dengan demikian, Outlook ini memadukan dimensi pasar dan dimensi agroklimat sebagai fondasi awal untuk membaca kondisi Q2 2026.

Di atas fondasi tersebut, analisis kemudian bergerak ke pembentukan harga CPO, baik global maupun domestik, yang dipengaruhi oleh interaksi antara neraca pasar, harga energi, dan sentimen eksternal. Pergerakan harga ini selanjutnya dihubungkan dengan instrumen kebijakan fiskal dan perdagangan, khususnya Harga Referensi, Pungutan Ekspor, dan Bea Keluar, untuk menjelaskan bagaimana dinamika pasar global diterjemahkan ke dalam implikasi ekonomi domestik.

Setelah itu, Outlook memperluas pembahasan ke dimensi perdagangan dan geopolitik global. Bagian ini penting untuk menunjukkan bahwa arah industri sawit Indonesia pada Q2 2026 tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal, tetapi juga oleh peluang pasar baru, perubahan kebijakan mitra dagang, gangguan rantai pasok, dan volatilitas energi internasional.

Sebagai penutup dari keseluruhan alur analisis, dokumen ini memasukkan pembahasan mengenai Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Bagian ini memberi dimensi struktural jangka menengah, sehingga pembacaan terhadap Q2 2026 tidak berhenti pada gejala pasar jangka pendek, tetapi juga dikaitkan dengan persoalan produktivitas nasional yang akan menentukan ketahanan pasokan pada tahun-tahun mendatang.

Dengan demikian, struktur Outlook Sawit Q2 2026 dibangun sebagai satu sistem analisis yang utuh: dimulai dari kondisi pasar, dijelaskan melalui konteks iklim dan produksi, diteruskan ke pembentukan harga, dibaca implikasinya melalui kebijakan fiskal dan perdagangan, diperluas ke lanskap geopolitik global, lalu ditautkan dengan tantangan struktural melalui PSR. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan pembacaan yang lebih tajam, kontekstual, dan relevan bagi perumusan kebijakan maupun strategi industri.

1.4 Kerangka Besar Outlook Q2 2026

Kerangka besar Outlook Sawit Q2 2026 disusun untuk menggambarkan hubungan antar faktor yang membentuk arah industri kelapa sawit Indonesia pada periode April–Juni 2026. Dalam kerangka ini, industri sawit dipahami bukan sekadar sebagai sistem produksi komoditas, tetapi sebagai ekosistem yang dipengaruhi secara simultan oleh faktor pasar, iklim, energi, kebijakan fiskal, perdagangan global, dan persoalan struktural di tingkat hulu.

Secara umum, Outlook ini dibangun atas enam pilar analisis yang saling terhubung.

- **Pilar pertama** adalah **Outlook Supply–Demand Q2 2026**. Pilar ini menjadi fondasi utama dalam memahami kondisi pasar karena mencakup proyeksi produksi, konsumsi domestik, ekspor, dan stok. Dari pilar inilah dapat dibaca apakah pasar bergerak menuju kondisi yang lebih longgar atau lebih ketat, serta seberapa besar ruang fleksibilitas yang tersedia bagi industri dalam merespons perubahan permintaan maupun kebijakan.
- **Pilar kedua** adalah **Outlook Iklim dan Dampaknya terhadap Produksi Sawit**. Pilar ini menjelaskan bahwa dinamika produksi pada Q2 2026 tidak dapat dibaca semata-mata dari data agregat, tetapi harus ditempatkan dalam konteks perubahan rezim iklim, pemulihan pascabanjir, serta sinyal awal tekanan musim kering di sentra-sentra produksi utama. Dengan kata lain, iklim menjadi variabel penjelas yang penting bagi pembentukan prospek pasokan nasional.
- **Pilar ketiga** adalah **Outlook Harga CPO Q2 2026**. Pilar ini menempatkan harga sebagai titik temu antara faktor fundamental pasar dan tekanan eksternal. Dalam konteks Q2 2026, harga CPO dipengaruhi bukan hanya oleh kondisi supply–demand, tetapi juga oleh dinamika harga energi, premi geopolitik, dan perubahan ekspektasi pasar global.

- **Pilar keempat** adalah **Outlook Pungutan Ekspor dan Bea Keluar Sawit Q2 2026**. Bagian ini menelaah bagaimana perubahan harga internasional diterjemahkan ke dalam instrumen kebijakan domestik, khususnya melalui Harga Referensi (HR), Pungutan Ekspor (PE), dan Bea Keluar (BK). Pilar ini penting karena menjadi jembatan antara dinamika pasar global dan implikasi ekonomi di dalam negeri, termasuk terhadap daya saing ekspor, harga TBS, dan ruang fiskal sektor sawit.
- **Pilar kelima** adalah **Sawit Indonesia dalam Dinamika Perdagangan dan Geopolitik Global**. Pilar ini memperluas pembahasan ke konteks internasional yang lebih strategis, mencakup peluang pasar, tekanan rantai pasok, gangguan energi global, hingga implikasi ketidakpastian geopolitik terhadap arah kebijakan biodiesel nasional. Pada bagian ini, sawit dibaca bukan hanya sebagai komoditas ekspor, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam ketahanan energi dan diplomasi ekonomi.
- **Pilar keenam** adalah **Outlook Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)**. Pilar ini memberikan perspektif jangka menengah terhadap keberlanjutan industri. Meskipun Outlook berfokus pada Q2 2026, pembacaan terhadap arah industri tidak akan utuh tanpa melihat kondisi produktivitas kebun rakyat sebagai basis pasokan nasional. Karena itu, perkembangan PSR menjadi indikator penting untuk menilai kesiapan struktural industri sawit Indonesia dalam menjawab tekanan permintaan masa depan.

Keenam pilar tersebut disusun secara berurutan, tetapi tidak bersifat linier semata. Masing-masing saling memengaruhi dan saling menjelaskan. Perubahan iklim memengaruhi produksi; produksi memengaruhi keseimbangan pasar; keseimbangan pasar memengaruhi harga; harga memengaruhi HR, PE, dan BK; kebijakan fiskal memengaruhi daya saing dan transmisi harga domestik; sementara keseluruhan dinamika itu berlangsung dalam konteks perdagangan dan geopolitik global yang terus berubah. Di balik semuanya, faktor struktural seperti PSR menentukan seberapa kuat fondasi industri dalam jangka menengah.

Dengan kerangka tersebut, Outlook Sawit Q2 2026 tidak hanya menyajikan proyeksi per bab, melainkan membangun satu alur pembacaan yang utuh mengenai bagaimana berbagai faktor berinteraksi dalam membentuk arah industri kelapa sawit Indonesia.

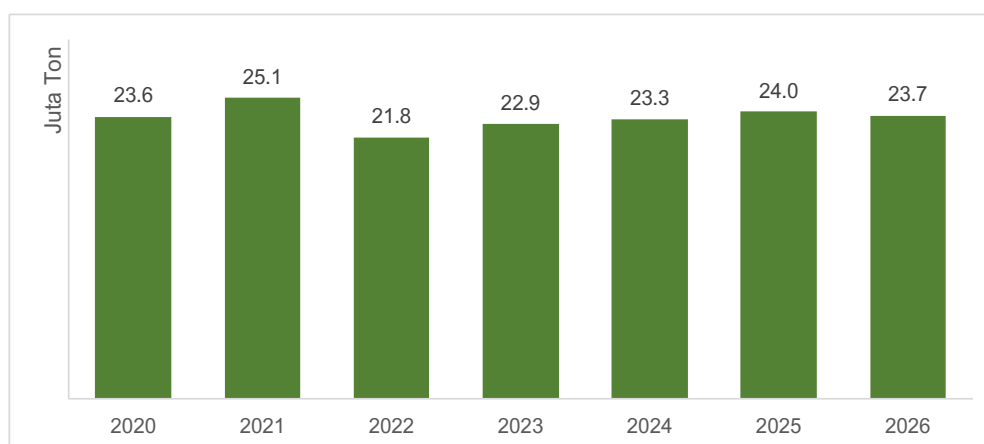


BAB 2. OUTLOOK SUPPLY-DEMAND Q2 2026

2.1 Outlook Produksi Q2 2026

2.1.1 Produksi Nasional s.d. Q2 2026

Secara kumulatif, produksi nasional CPO dan CPKO hingga akhir Q2 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 23,7 juta ton. Capaian ini sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 24,0 juta ton, namun masih berada dalam kisaran historis produksi nasional dalam beberapa tahun terakhir.



Gambar 1. Produksi CPO dan CPKO s.d. Q2

Sumber: (BPS, 2025c; Ditjenbun, 2025) diolah kembali oleh IPOSS

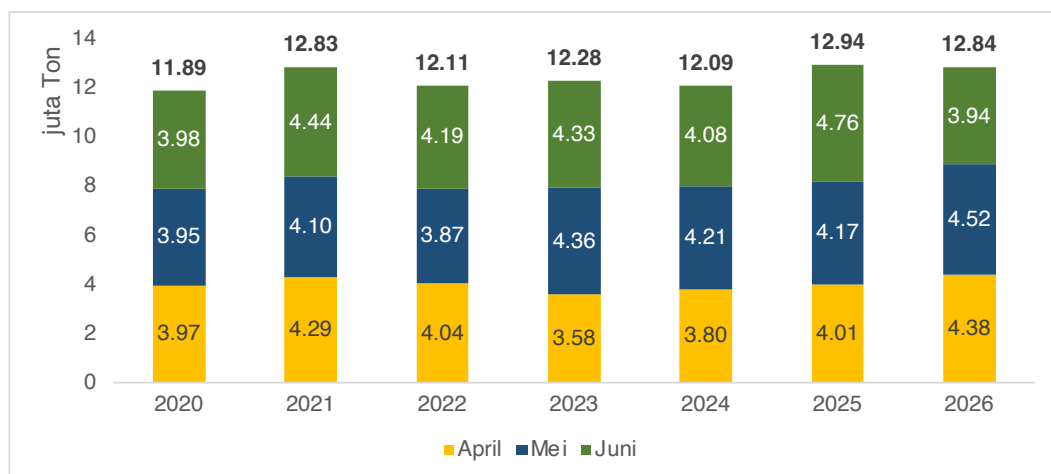
Jika dibandingkan secara historis, capaian tersebut masih lebih tinggi daripada tahun 2022 dan 2023, serta relatif sebanding dengan level produksi tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi koreksi ringan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja produksi semester I 2026 belum menunjukkan pelemahan yang tajam.

Koreksi tipis pada produksi kumulatif hingga akhir Q2 2026 mengindikasikan adanya tekanan pada fase awal hingga pertengahan tahun, terutama yang berkaitan dengan faktor cuaca dan dampak lanjutan dari gangguan operasional di sejumlah sentra produksi. Namun demikian, secara agregat pasokan nasional hingga pertengahan tahun masih tergolong cukup terjaga, sehingga belum mengindikasikan adanya gangguan besar terhadap keseimbangan pasokan domestik.

Dalam perspektif supply-demand, kondisi ini menunjukkan bahwa ruang pasok pada semester I 2026 cenderung sedikit lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, penurunan tersebut masih bersifat moderat dan belum mencerminkan pelemahan struktural kapasitas produksi nasional.

2.1.2 Dinamika Produksi Q2 secara Year-on-Year

Jika dilihat secara khusus pada Q2, produksi nasional pada periode April–Juni 2026 diproyeksikan sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh dampak lanjutan bencana banjir yang melanda sebagian sentra produksi sawit, di mana proses pemulihan areal dan infrastruktur kebun pada sejumlah wilayah belum sepenuhnya selesai.



Gambar 2. Produksi Nasional Q2 Year on Year – YoY

Sumber: (BPS, 2025c; Ditjenbun, 2025) diolah kembali oleh IPOSS

Secara historis, produksi pada Q2 pada umumnya cenderung menunjukkan peningkatan dibandingkan awal tahun, seiring dengan kondisi agroklimat yang umumnya lebih mendukung serta fase produksi tanaman yang lebih optimal. Namun demikian, pada Q2 2026 produksi diproyeksikan mengalami koreksi moderat dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Beberapa faktor utama yang memengaruhi dinamika produksi Q2 2026 antara lain:

- **Kondisi cuaca yang relatif lebih kering** pada sejumlah wilayah sentra, yang berpotensi menekan pembentukan produksi tandan buah segar (TBS), terutama pada periode menjelang puncak panen.
- **Dampak lanjutan bencana banjir pada akhir 2025**, di mana sebagian areal dan infrastruktur kebun masih berada dalam proses pemulihan sehingga produktivitas belum sepenuhnya kembali ke tingkat normal.
- **Variasi performa bulanan dalam Q2**, di mana produksi April dan Mei relatif stabil, namun potensi penguatan pada Juni diperkirakan tidak setinggi tahun sebelumnya.

Secara agregat, produksi nasional pada Q2 2026 diperkirakan sedikit berada di bawah level 2025, meskipun masih berada dalam kisaran historis beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, koreksi pada triwulan II lebih tepat dipahami sebagai penyesuaian moderat yang dipengaruhi oleh faktor cuaca dan

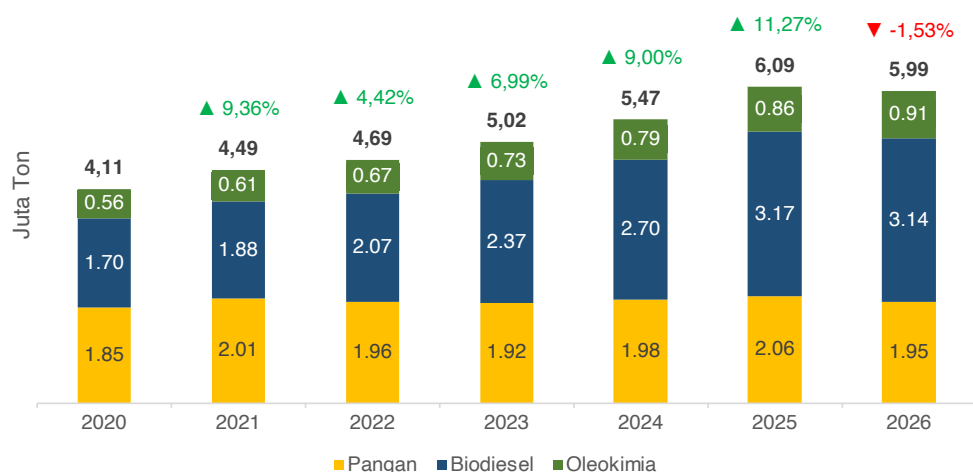
proses pemulihan pascabencana, dibandingkan sebagai indikasi perubahan struktural pada kapasitas produksi nasional.

Dalam perspektif neraca supply-demand, pelemahan moderat tersebut berpotensi mengurangi ruang surplus produksi pada pertengahan tahun, namun belum mengindikasikan tekanan pasokan yang signifikan pada skala nasional.

2.2 Outlook Konsumsi Q2 2026

2.2.1 Kondisi Umum

Konsumsi domestik minyak sawit (CPO dan CPKO) pada triwulan II menunjukkan tren meningkat sepanjang periode 2020–2025, namun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2026. Total konsumsi Q2 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 5,99 juta ton, menurun dibandingkan dengan 6,09 juta ton pada 2025.



Gambar 3. Konsumsi Domestik Minyak Sawit Indonesia pada Q2

Sumber: (BPS, 2025a, 2025d; Keputusan Menteri ESDM RI, 2025) diolah kembali oleh IPOSS

Secara historis, konsumsi domestik minyak sawit pada Q2 menunjukkan peningkatan yang stabil setiap tahunnya, seiring dengan pertumbuhan konsumsi pangan, biodiesel, dan oleokimia. Namun, pada Q2 2026, diperkirakan terjadi sedikit penurunan konsumsi sebesar 1,53% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang memengaruhi perubahan ini antara lain:

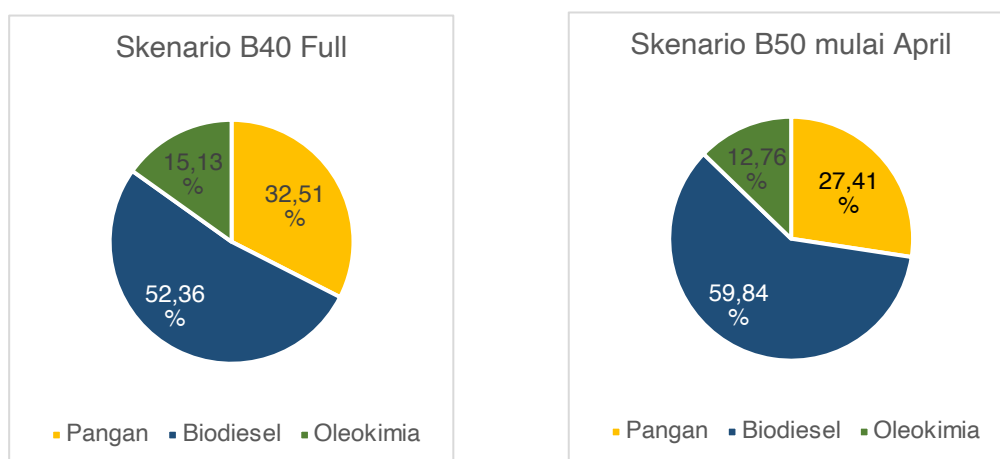
- **Perubahan pola konsumsi musiman**, di mana pada tahun 2026, Hari Raya Idul Fitri tidak jatuh pada kuartal kedua, yang biasanya meningkatkan konsumsi pangan (terutama untuk kebutuhan rumah tangga selama perayaan).
- **Penurunan konsumsi biodiesel**, yang juga terpengaruh oleh pergeseran waktu lebaran. Biasanya, selama lebaran, terjadi lonjakan permintaan biodiesel karena tingginya mobilitas masyarakat yang mudik, tetapi pada 2026, periode mudik tidak berada pada Q2, sehingga konsumsi biodiesel sedikit berkurang.
- **Konsistensi konsumsi oleokimia** yang tetap menunjukkan tren pertumbuhan dari tahun ke tahun.
- **Struktur konsumsi yang lebih seimbang**, meskipun biodiesel tetap menjadi pendorong utama.

2.2.2 Potensi Pergeseran Konsumsi akibat Disrupsi Energi Global

Di tengah ketidakpastian pasokan energi global akibat konflik geopolitik yang melibatkan Iran, berpotensi mengganggu distribusi pasokan melalui jalur-jalur strategis seperti Selat Hormuz. Kondisi ini dapat berpotensi mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia dan membuka peluang bagi pemerintah untuk mempertimbangkan peningkatan bauran biodiesel dari B40 menjadi B50 sebagai respons atas tekanan tersebut.

Peningkatan eskalasi konflik tidak hanya berisiko menghambat jalur distribusi, tetapi juga berpotensi merusak sejumlah fasilitas produksi dan pengolahan minyak dan gas bumi di kawasan. Jika kondisi ini berlanjut, maka kontraksi pasokan minyak bumi dunia dalam beberapa waktu ke depan menjadi risiko yang perlu diperhitungkan. Bagi Indonesia, situasi tersebut dapat memperberat pemenuhan kebutuhan bahan bakar diesel domestik yang masih sangat dipengaruhi oleh pasokan berbasis minyak bumi. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan terjadinya pergeseran bauran biodiesel melalui peningkatan pemanfaatan CPO sebagai bahan baku, dari B40 menuju B50.

Berikut ini dua skenario yang memperlihatkan perbandingan alokasi konsumsi CPO pada Q2 2026. Skenario pertama menggambarkan kondisi apabila B40 diimplementasikan secara penuh sepanjang 2026, sedangkan skenario kedua menggambarkan kondisi apabila B50 mulai diterapkan sejak April 2026.



Gambar 4. Skenario I dan II Alokasi Konsumsi Domestik Minyak Sawit Indonesia pada Q2 2026 (juta ton)

Sumber: (BPS, 2025d, 2025b; Keputusan Menteri ESDM RI, 2025) diolah kembali oleh IPOSS

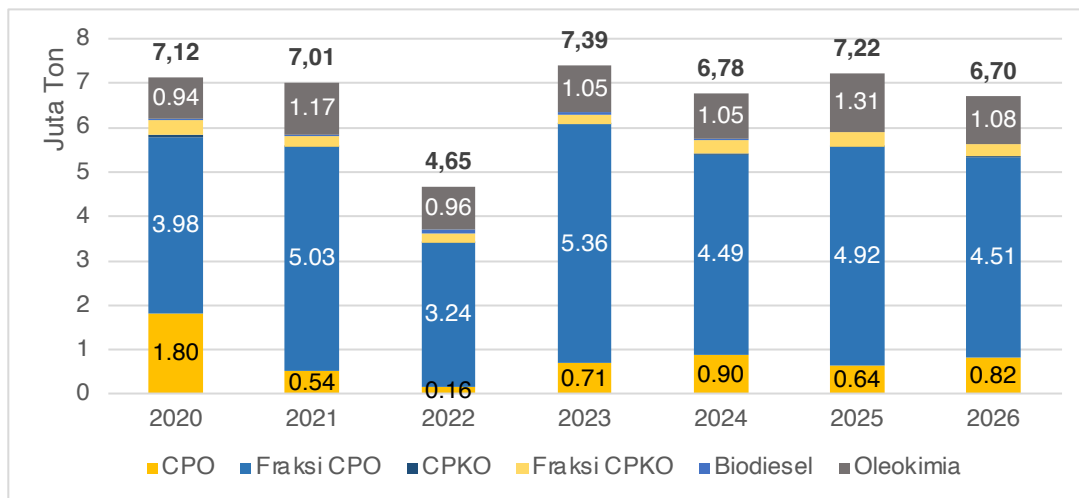
Gambar 4 menunjukkan bahwa percepatan implementasi B50 akan mendorong perubahan struktur konsumsi domestik minyak sawit secara cukup signifikan. Pada skenario B40 penuh, biodiesel menyerap sekitar 52,36% dari total konsumsi domestik, sementara sektor pangan dan oleokimia masing-masing mengambil pangsa 32,51% dan 15,13%. Namun, apabila B50 mulai diterapkan sejak April 2026, pangsa biodiesel diperkirakan meningkat menjadi 59,84%, sedangkan pangsa pangan turun menjadi 27,41% dan oleokimia menjadi 12,76%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan mandat biodiesel akan memperkuat orientasi konsumsi domestik ke sektor energi, sekaligus mempersempit ruang alokasi bagi sektor non-energi.

Dalam perspektif yang lebih strategis, perubahan komposisi tersebut menunjukkan bahwa di tengah disrupsi energi global, minyak sawit domestik berpotensi semakin diposisikan sebagai instrumen stabilisasi energi nasional. Namun demikian, konsekuensinya adalah meningkatnya kompetisi alokasi CPO di pasar domestik.

Jika produksi nasional tidak bertumbuh secara sepadan, maka kenaikan serapan untuk biodiesel dapat mengurangi fleksibilitas pasok bagi kebutuhan pangan, oleokimia, maupun ekspor. Dengan demikian, percepatan B50 perlu dipahami bukan hanya sebagai respons terhadap tekanan energi global, tetapi juga sebagai keputusan strategis yang akan memengaruhi keseimbangan pemanfaatan CPO nasional.

2.3 Outlook Ekspor Q2 2026

Secara agregat, ekspor produk sawit nasional pada Q2 2026 diperkirakan mencapai sekitar 6,70 juta ton, lebih rendah dibandingkan capaian Q2 2025 sebesar 7,22 juta ton. Dengan demikian, terjadi penurunan sekitar 520 ribu ton secara tahunan. Proyeksi ini disusun dengan asumsi bahwa kebijakan mandatori biodiesel B40 masih berlaku pada periode tersebut.



Gambar 5. Ekspor Produk Sawit Nasional Q2

Sumber: (BPS, 2026a) diolah kembali oleh IPOSS

Secara historis, ekspor produk sawit nasional pada Q2 menunjukkan pola yang fluktuatif. Setelah mencapai 7,39 juta ton pada 2023 dan 7,22 juta ton pada 2025, volume ekspor pada Q2 2026 diperkirakan mengalami koreksi dan kembali berada di bawah level dua tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama mencerminkan semakin ketatnya keseimbangan antara kebutuhan domestik dan ruang ekspor, khususnya untuk produk berbasis CPO.

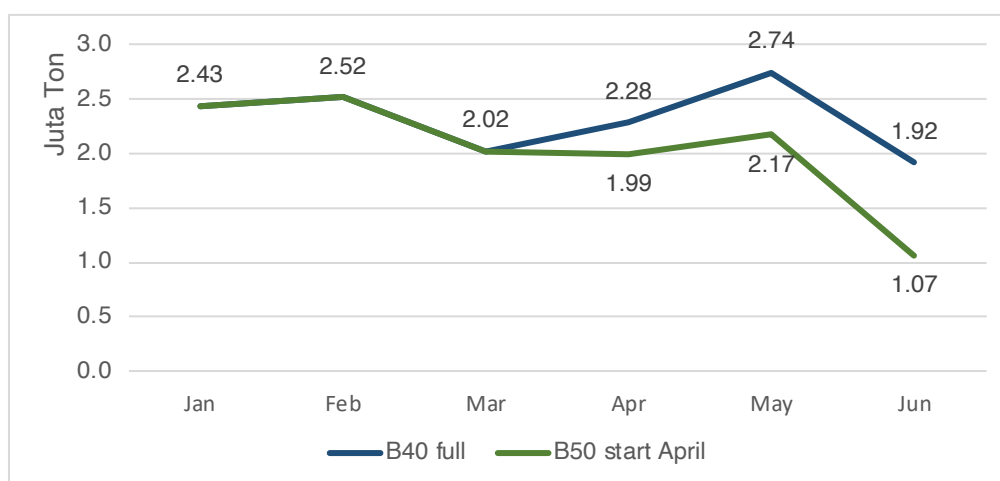
Beberapa faktor utama yang memengaruhi ekspor produk sawit pada Q2 2026 antara lain:

- **Penurunan ekspor CPO** pada Q2 2026 yang terlihat lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi biodiesel domestik dalam kerangka kebijakan B40, serta semakin besarnya alokasi CPO untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- **Peningkatan ekspor CPKO**, meskipun kontribusinya terhadap total ekspor masih relatif terbatas. Pada Q2 2026, volume ekspor CPKO diperkirakan meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan tahun 2025, dari sekitar **3,8 ribu ton** menjadi **17,2 ribu ton**. Kenaikan ini menunjukkan adanya ruang pertumbuhan pada produk turunan tertentu di tengah tekanan terhadap ekspor CPO.
- **Koreksi ekspor oleokimia** pada Q2 2026, meskipun secara historis produk ini cenderung menunjukkan tren yang relatif kuat sebagai komponen ekspor bernilai tambah. Penurunan sekitar **230 ribu ton** diperkirakan berkaitan dengan gangguan pasokan global dan fluktuasi pasar internasional. Namun demikian, oleokimia tetap menjadi salah satu penopang penting ekspor sawit Indonesia karena nilai tambah dan basis permintaannya yang relatif kuat.

- **Penurunan volume ekspor secara keseluruhan** pada Q2 2026 juga dipengaruhi oleh Eskalasi konflik, perang Iran–Israel–AS di Timur Tengah dan gangguan rantai pasok global, yang meningkatkan biaya logistik serta menekan kelancaran distribusi ke pasar internasional. Gangguan pada jalur pengiriman mendorong penggunaan rute alternatif yang lebih panjang dan mahal, sehingga meningkatkan biaya ekspor. Dalam situasi tersebut, permintaan dari pasar internasional cenderung menjadi lebih selektif, terutama ketika harga produk sawit juga mengalami kenaikan (Elaeis, 2026).

2.4 Outlook Stok Q2 2026

Sebagai konsekuensi dari dinamika produksi, pergeseran konsumsi domestik, dan tekanan terhadap ekspor, stok akhir minyak sawit nasional pada Q1–Q2 2026 diperkirakan mengalami perubahan yang cukup nyata, terutama apabila terjadi percepatan implementasi biodiesel B50 mulai April 2026. Dalam konteks ini, stok tidak hanya mencerminkan kondisi pasokan, tetapi juga menjadi indikator penting untuk membaca seberapa ketat keseimbangan supply–demand domestik pada paruh pertama tahun 2026.



Gambar 6. Stok Akhir Minyak Sawit Q1–Q2 2026

Sumber: (BPS, 2025d, 2025b, 2026b; Keputusan Menteri ESDM RI, 2025) diolah kembali oleh IPOSS

Pada awal 2026, stok akhir minyak sawit nasional masih berada pada tingkat yang relatif stabil, yakni sekitar 2,43 juta ton pada Januari dan 2,52 juta ton pada Februari. Memasuki Maret, stok turun ke sekitar 2,02 juta ton, yang menunjukkan mulai terjadinya penyesuaian antara pasokan dan penyerapan domestik. Setelah itu, perbedaan antara dua skenario mulai terlihat lebih jelas sejak April 2026.

Pada skenario B40 tetap berjalan, stok diperkirakan berada pada kisaran 2,28 juta ton pada April, meningkat menjadi 2,74 juta ton pada Mei, lalu turun menjadi 1,92 juta ton pada Juni. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi, ruang stok masih relatif terjaga sepanjang Q2. Sebaliknya, pada skenario B50 mulai diterapkan sejak April, stok diperkirakan turun menjadi 1,99 juta ton pada April, hanya naik terbatas ke 2,17 juta ton pada Mei, dan kemudian merosot tajam menjadi sekitar 1,07 juta ton pada Juni.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa percepatan implementasi B50 akan mempercepat penyerapan CPO untuk kebutuhan biodiesel domestik, sehingga stok akhir nasional menurun lebih cepat dibandingkan skenario B40. Pada Juni 2026, selisih stok antara kedua skenario mencapai sekitar **850 ribu ton**, yang menandakan bahwa peningkatan bauran biodiesel dapat secara signifikan mempersempit buffer stok nasional. Dengan kata lain, semakin besar alokasi CPO untuk energi, semakin kecil ruang stok yang tersedia sebagai penyangga terhadap fluktuasi pasar.

Dalam perspektif *supply–demand*, penurunan stok yang lebih tajam pada skenario B50 mengindikasikan bahwa pasar domestik akan bergerak ke kondisi yang lebih ketat. Situasi ini pada satu sisi dapat

memperkuat fungsi sawit sebagai instrumen ketahanan energi nasional, tetapi pada sisi lain berpotensi mengurangi fleksibilitas pasokan bagi ekspor dan sektor non-energi. Oleh karena itu, perkembangan stok pada Q2 2026 perlu dicermati secara hati-hati, karena akan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai seberapa jauh percepatan mandatori biodiesel dapat dilakukan tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap keseimbangan pasar minyak sawit nasional.

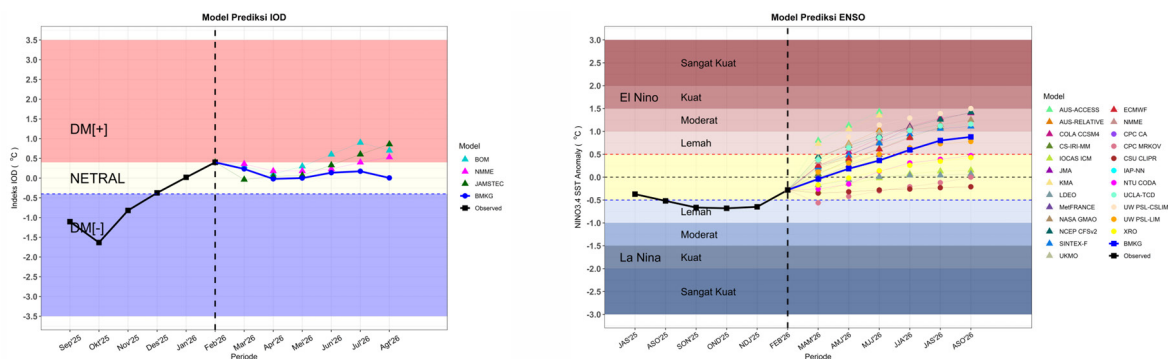


BAB 3. OUTLOOK IKLIM DAN DAMPAKNYA TERHADAP PRODUKSI SAWIT

Memasuki Q2 2026, lanskap iklim Indonesia mengalami pergeseran struktural yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Fenomena La Niña lemah yang sempat mewarnai dinamika hidrometeorologi pada akhir 2025—dan menjadi salah satu pemicu banjir di sejumlah sentra produksi sawit di Sumatera—mulai berakhir pada Februari 2026 dan bertransisi ke fase ENSO netral pada Maret 2026 (BMKG, 2026a). ENSO (*El Niño–Southern Oscillation*) merupakan fenomena interaksi atmosfer–laut di Samudra Pasifik tropis yang memengaruhi pola curah hujan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Peralihan menuju fase netral ini menandai berakhirnya dominasi kondisi basah dan membuka kemungkinan pergeseran menuju pola cuaca yang lebih kering pada paruh kedua tahun berjalan. Dalam konteks industri sawit, perubahan rezim iklim tersebut relevan karena memengaruhi tidak hanya prospek produksi Q2 2026, tetapi juga pembentukan risiko produksi pada semester berikutnya (BMKG, 2026b).

3.1 Dinamika Iklim: Transisi Menuju Fase Musim Kering

Pemutakhiran prediksi BMKG per Maret 2026 menunjukkan bahwa indeks ENSO diperkirakan bergerak secara progresif dari fase netral menuju ambang El Niño pada paruh kedua tahun berjalan. Nilai indeks Niño3.4 diproyeksikan mencapai sekitar +0,60 pada periode JJA (Juni–Juli–Agustus) 2026 dan meningkat menjadi sekitar +0,88 pada periode ASO (Agustus–September–Oktober) 2026. Sejumlah model iklim global juga menunjukkan kecenderungan yang seragam, yaitu *tend-to-El Niño* pada Semester II 2026, dengan probabilitas kemunculan El Niño kategori lemah hingga moderat sekitar 50–60% (BMKG, 2026b; WMO, 2026). Yang perlu diwaspadai secara khusus adalah kemungkinan terjadinya superposisi antara El Niño dan IOD positif pada pertengahan Semester II, karena kombinasi keduanya secara historis dapat mengamplifikasi kondisi kekeringan di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah (Nur'utami & Hidayat, 2016).



Gambar 7. Model Prediksi Iklim 2026

Sumber: BMKG (2026b)

Implikasi langsung terhadap Q2 adalah transisi cuaca yang semakin mengarah ke kondisi kering. BMKG memprediksi bahwa musim kemarau 2026 akan datang lebih awal dari normal pada 46,5% wilayah Indonesia atau sekitar 325 Zona Musim (ZOM). Di sejumlah wilayah, awal kemarau bahkan mulai muncul sejak Maret 2026 dalam skala terbatas, lalu meluas lebih signifikan pada April 2026. Bagi sentra sawit, sinyal ini penting karena menunjukkan bahwa tekanan hidrologis tidak menunggu memasuki semester II, melainkan mulai terbentuk sejak Q2 di sebagian wilayah produksi dan wilayah penyangga logistik (BMKG, 2026a). Lebih jauh, sekitar 64,5% ZOM diprediksi mengalami sifat hujan bawah normal sepanjang

musim kemarau, sementara 57,2% ZOM akan mengalami durasi kemarau yang lebih panjang dari kondisi normalnya (BMKG, 2026b).

Tiga indikator tersebut menunjukkan bahwa kemarau 2026 bukan sekadar datang lebih kering, tetapi juga memiliki ritme yang lebih agresif: **lebih awal, lebih cepat mencapai puncak, dan cenderung berlangsung lebih lama**. Peta BMKG yang mas upload memperlihatkan bahwa puncak musim kemarau di beberapa wilayah bahkan sudah mulai muncul sejak Februari–Maret 2026, lebih maju dibanding pola umum yang biasanya terkonsentrasi pada Agustus. Pada saat yang sama, beberapa wilayah diperkirakan mengalami durasi musim kemarau yang sangat panjang, disertai dominasi sifat hujan bawah normal. Bagi sektor sawit, pola ini berarti waktu adaptasi antara berakhirnya fase basah dan munculnya tekanan kekeringan menjadi semakin sempit. Dengan kata lain, risiko 2026 tidak hanya berasal dari berkurangnya hujan, tetapi dari perubahan ritme musim yang lebih tajam dan lebih cepat dari biasanya.

3.2 Implikasi terhadap Produksi Sawit Q2 2026

Dari perspektif agronomi, transisi menuju kondisi yang lebih kering pada Q2 2026 membawa implikasi ganda terhadap produksi sawit. Di satu sisi, berakhirnya fase basah La Niña memberi sinyal positif bagi pemulihan operasional kebun yang terdampak banjir di Aceh dan Sumatera Utara pada akhir 2025. Berkurangnya genangan secara bertahap memungkinkan normalisasi aktivitas panen, perawatan, dan pemupukan yang sebelumnya terganggu, sehingga pada April–Mei 2026 terdapat peluang pemulihan produksi secara parsial di sejumlah wilayah terdampak.

Namun di sisi lain, menguatnya sinyal kemarau pada paruh akhir Q2—khususnya memasuki Juni 2026—mulai menciptakan tekanan baru terhadap produktivitas tanaman. Kelapa sawit memerlukan curah hujan optimal sekitar 150–200 mm per bulan yang terdistribusi merata. Ketika defisit air mulai muncul, tanaman dapat mengalami stres fisiologis yang memengaruhi pembentukan tandan buah segar (TBS) pada berbagai fase pertumbuhan reproduktif, mulai dari inisiasi bunga, diferensiasi jenis kelamin bunga, perkembangan bunga hingga antesis, pembentukan kelopak, pecah seludang, penyerbukan, hingga pembesaran buah sampai fase panen (Corley & Tinker, 2016). Dampak ini lazimnya tidak muncul secara serentak, melainkan bersifat *lagged* dengan rentang sekitar 2–30 bulan setelah kejadian defisit air, bergantung pada fase perkembangan reproduktif tanaman yang terdampak. Dengan demikian, tekanan produksi akibat kekeringan awal kemarau 2026 diperkirakan mulai muncul secara bertahap sejak Q2 2026, kemudian menjadi lebih nyata pada Q3 2026, dan dapat berlanjut hingga Q4 2027.

Yang perlu dicatat, tekanan iklim pada 2026 tidak berdiri sendiri sebagai episode kering biasa. Industri sawit baru saja keluar dari gangguan hidrologis berupa banjir pada akhir 2025, sehingga Q2 2026 berpotensi menjadi fase transisi yang cukup tajam: dari kendala kelebihan air menuju ancaman kekurangan air.

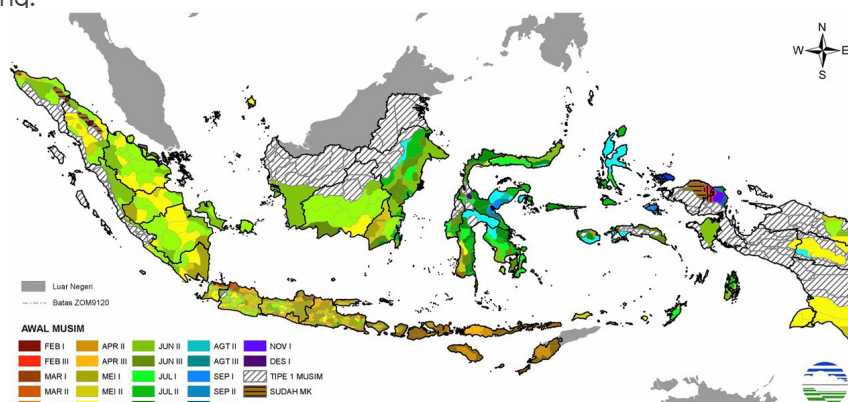


Perubahan rezim hidrologi yang cepat seperti ini dapat mempersempit *window* operasional di tingkat kebun, terutama untuk pemulihan infrastruktur, pengaturan jadwal pemupukan, pengelolaan air di areal mineral maupun gambut, serta kesiapsiagaan terhadap kebakaran pada semester berikutnya. Dengan demikian, implikasi iklim terhadap sawit pada 2026 tidak hanya menyentuh aspek produktivitas, tetapi juga menyangkut stabilitas operasional sistem kebun secara keseluruhan.

Secara agregat, produksi nasional Q2 2026 diproyeksikan sedikit berada di bawah level 2025, dengan total produksi diperkirakan sekitar 12,84 juta ton atau terkoreksi moderat dibandingkan 12,94 juta ton pada Q2 2025. Koreksi ini lebih mencerminkan kombinasi antara proses pemulihan pascabanjir yang belum sepenuhnya tuntas dan mulai munculnya tekanan kekeringan awal kemarau, dibandingkan perubahan struktural pada kapasitas produksi nasional. Dalam perspektif neraca *supply-demand*, pelemahan moderat pada pertengahan tahun ini berpotensi mempersempit ruang surplus yang sejak awal sudah relatif terbatas, sekaligus meningkatkan sensitivitas pasar terhadap dinamika harga global pada semester kedua 2026.

3.3 Proyeksi Spasial Musim Kemarau Q2 2026 dan Implikasinya terhadap Produksi Sawit

Berdasarkan peta wilayah dengan awal musim kemarau yang lebih awal dari normal yang dirilis BMKG, transisi menuju kondisi kering pada 2026 tidak hanya berlangsung luas secara spasial, tetapi juga menunjukkan pergeseran waktu yang cukup penting dibandingkan pola normal. Karena itu, pembacaan risiko iklim terhadap sektor sawit tidak cukup hanya didasarkan pada peta awal musim kemarau, tetapi juga perlu dilengkapi dengan informasi mengenai wilayah yang mengalami kemarau lebih dini, puncak musim kemarau yang maju, serta kecenderungan durasi kemarau yang lebih panjang dan sifat hujan yang lebih kering.

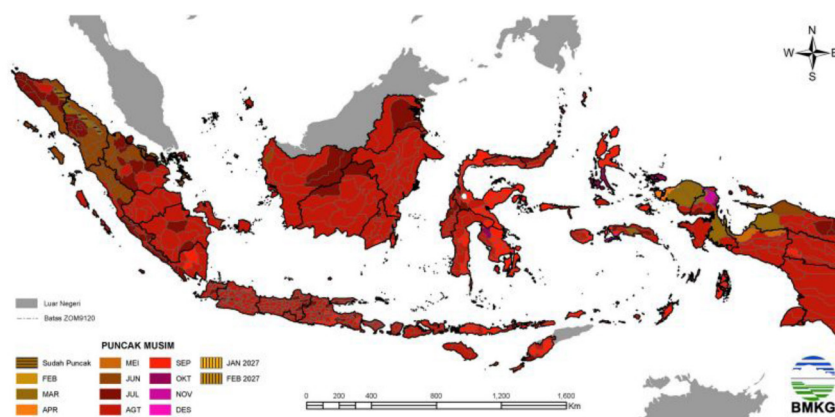


Gambar 8. Wilayah dengan Awal Musim Kemarau Lebih Awal dari Normal

Sumber: BMKG (2026b)

Peta pada Gambar 8 menunjukkan bahwa di sejumlah wilayah, musim kemarau 2026 diprakirakan datang lebih awal dibandingkan pola normal. Bagi sektor sawit, sinyal ini penting karena menunjukkan bahwa sebagian kebun menghadapi penyempitan waktu transisi dari fase basah menuju fase kering. Dalam konteks 2026, kondisi ini menjadi semakin relevan karena banyak sentra sawit sebelumnya baru saja mengalami tekanan hidrologis berupa banjir pada akhir 2025. Dengan demikian, wilayah yang awal kemaraunya maju lebih cepat berpotensi mengalami perubahan rezim hidrologi yang lebih tajam, yakni dari kelebihan air menuju defisit air dalam rentang waktu yang relatif singkat.

Di antara wilayah yang perlu mendapat perhatian adalah koridor Sumatera bagian tengah dan selatan serta sebagian Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, mengingat kawasan-kawasan tersebut merupakan sentra produksi sawit nasional sekaligus wilayah dengan sensitivitas tinggi terhadap perubahan neraca air.

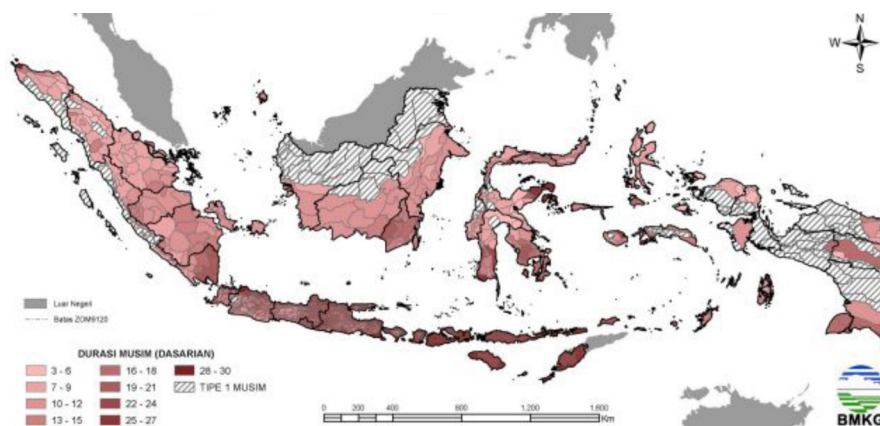


Gambar 9. Proyeksi Wilayah dengan Puncak Musim Kemarau 2026

Sumber: BMKG (2026b)

Gambar 9 menunjukkan bahwa di banyak wilayah, puncak musim kemarau 2026 diperkirakan terjadi lebih cepat dibandingkan pola tahunan normal. Hal ini berarti tekanan iklim terhadap tanaman, kelembapan tanah, dan sistem operasional kebun dapat terkonsolidasi lebih dini, bahkan sebelum memasuki puncak semester II. Dalam kerangka industri sawit, percepatan puncak kemarau seperti ini meningkatkan risiko penurunan efisiensi pemupukan, percepatan *water stress*, dan naiknya kerentanan terhadap kebakaran pada kawasan gambut.

Percepatan puncak musim kemarau juga memperjelas bahwa ancaman pada 2026 bukan hanya soal lokasi, tetapi juga soal *timing* tekanan iklim. Ketika puncak musim kering maju dari pola normal, sentra sawit menghadapi risiko bahwa tekanan hidrologis dan operasional datang lebih awal dari jadwal adaptasi yang lazim. Bagi wilayah gambut seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, kondisi ini dapat meningkatkan peluang karhutla, mengganggu distribusi TBS, serta memperbesar biaya mitigasi di tingkat kebun dan pabrik.



Gambar 10. Durasi dan/atau Sifat Musim Kemarau 2026

Sumber: BMKG (2026b)

Dimensi spasial tersebut menjadi lebih penting ketika dibaca bersama kecenderungan bahwa kemarau 2026 di banyak wilayah tidak hanya maju, tetapi juga berpotensi berlangsung lebih panjang dan disertai sifat hujan bawah normal. Kombinasi antara awal kemarau yang maju, puncak kering yang lebih cepat, dan durasi yang lebih panjang menunjukkan bahwa risiko 2026 memiliki karakter yang lebih kompleks dibandingkan sekadar "musim kemarau biasa". Bagi sektor sawit, kondisi ini berarti ancaman tidak hanya terletak pada penurunan curah hujan, tetapi pada semakin panjangnya periode ketika tanaman, kebun, dan sistem logistik harus beroperasi dalam tekanan air yang lebih tinggi.

Dari perspektif risiko sektoral, setidaknya terdapat dua klaster wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi. Klaster pertama adalah koridor gambut Sumatera—terutama Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan—yang menghadapi kombinasi risiko berupa awal kemarau yang lebih dini, puncak kering yang maju, durasi tekanan yang panjang, serta tingginya potensi karhutla. Dampaknya bagi sawit tidak hanya berupa penurunan produktivitas TBS, tetapi juga gangguan panen, distribusi, logistik, dan reputasi keberlanjutan di pasar ekspor. Klaster kedua adalah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, yang menghadapi ancaman serupa pada kawasan gambut dan lahan mineral yang sensitif terhadap defisit air dan kebakaran.

Di luar dua klaster utama tersebut, Sumatera Utara dan Sumatera Barat tetap memerlukan kewaspadaan pada level sedang karena pergeseran kemarau dapat memunculkan defisit air dan tekanan produktivitas secara moderat. Sementara itu, beberapa wilayah lain seperti Lampung, Banten, dan sebagian kawasan timur lebih tepat ditempatkan dalam kategori pemantauan, terutama untuk melihat sejauh mana sinyal kemarau dini berkembang menjadi tekanan produksi yang lebih nyata pada semester II.

Secara agregat, pembacaan spasial dari berbagai peta BMKG menegaskan bahwa tekanan iklim 2026 terhadap industri sawit tidak hanya terletak pada luas wilayah terdampak, tetapi juga pada percepatan dan perpanjangan periode risiko. Dengan kata lain, tantangan pada 2026 bukan sekadar bahwa musim kemarau akan terjadi, melainkan bahwa di sejumlah sentra sawit utama kemarau berpotensi datang lebih awal, memuncak lebih cepat, dan bertahan lebih lama. Kondisi ini memperkuat urgensi langkah antisipasi berbasis wilayah, mulai dari pengelolaan muka air, sekat kanal, patroli titik panas, *early warning system* karhutla, hingga penyesuaian jadwal pemupukan dan konservasi kelembapan tanah sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko produksi pada semester II 2026 dan seterusnya.

3.4 Strategi Antisipasi Musim Kering

Untuk menerjemahkan pembacaan spasial tersebut ke dalam kebutuhan antisipasi yang lebih operasional, **Tabel 1** merangkum profil risiko iklim utama pada sejumlah wilayah sentra dan wilayah penyangga sawit, beserta bentuk respons yang diperlukan.

Tabel ini menunjukkan bahwa strategi adaptasi tidak dapat diseragamkan secara nasional, karena setiap provinsi menghadapi kombinasi risiko yang berbeda, baik dari sisi waktu onset kemarau, durasi tekanan, kerentanan karhutla, maupun implikasinya terhadap produktivitas dan operasional kebun. Dengan demikian, tabel ini berfungsi sebagai jembatan antara proyeksi iklim makro dan kebutuhan mitigasi di tingkat wilayah.

Tabel 1. Antisipasi Musim Kemarau 2026 terhadap Sektor Kelapa Sawit

No	Provinsi	Onset & Potensi El Niño (Waktu & Durasi)	Risiko Utama & Dampak bagi Sawit	Antisipasi yang Diperlukan
1	Aceh	Variatif	Dampak terbatas	Monitoring
2	Sumatera Utara	Jun; Jul-Sep (sedang)	Defisit air; penurunan produktivitas	Monitoring soil moisture; pemupukan adaptif
3	Riau	Onset: Apr-Mei (maju); El Niño: Jul-Okt (panjang)	Karhutla ekstrem; asap lintas wilayah; water stress; gangguan panen & logistik; risiko reputasi global	Canal blocking; patroli hotspot harian; fire brigade; dashboard early warning

No	Provinsi	Onset & Potensi El Niño (Waktu & Durasi)	Risiko Utama & Dampak bagi Sawit	Antisipasi yang Diperlukan
4	Jambi	Apr–Mei; Jul–Sep (panjang)	Karhutla gambut; penurunan TBS; degradasi lahan	Pengaturan muka air; sekat kanal; patroli terpadu
5	Sumatera Barat	Jun; Jul–Sep (sedang)	Kekeringan parsial	Konservasi air
6	Sumatera Selatan	Apr–Mei; Jul–Sep (panjang)	Karhutla luas; gangguan transport TBS; penurunan produksi	Fire break; water storage; kesiapsiagaan pemadaman
7	Bengkulu	Jun; Jul–Sep (sedang)	Penurunan produksi lokal	Pengelolaan air
8	Lampung	Mei; Agu–Okt (sedang– panjang)	Kekeringan; penurunan yield; stres tanaman	Konservasi air; mulching; irigasi lokal
9	Kalimantan Barat	Mei–Jun; Jul–Sep (panjang)	Hotspot tinggi; asap; gangguan operasional kebun & pabrik	Monitoring hotspot real-time; patroli; water management
10	Kalimantan Tengah	Mei–Jun; Jul–Sep (panjang)	Karhutla gambut kronis; subsidence; kerusakan lahan	Canal blocking; pengaturan water table; early suppression
11	Kalimantan Selatan	Jun; Agu–Okt (sedang– panjang)	Kekeringan + kebakaran lokal; penurunan produksi	Retensi air; patroli kebakaran
12	Kalimantan Timur	Jun; Agu–Okt (sedang)	Kekeringan lokal; gangguan operasional	Monitoring tanaman; efisiensi air
13	Kalimantan Utara	Jun; Agu–Okt (sedang)	Kekeringan parsial	Monitoring
14	Banten	Apr–Mei; Jul–Sep (sedang)	Kekeringan; stres tanaman	Monitoring tanaman; efisiensi air
15	Jawa Barat	Apr (maju); Jul–Agu (sedang)	Awal kemarau cepat; stres TBM	Penyesuaian kalender tanam; konservasi air
16	Sulawesi Selatan	Jun; Jul–Sep (sedang)	Kekeringan; penurunan produksi	Monitoring tanaman; water management
17	Sulawesi Tenggara	Jun; Jul–Sep (sedang)	Kekeringan lokal	Konservasi air
18	Sulawesi Barat	Jun; Jul–Sep (sedang)	Kekeringan parsial	Monitoring kebun
19	Maluku	Variatif	Dampak minimal	Monitoring
20	Maluku Utara	Variatif	Dampak minimal	Monitoring
21	Papua Barat	Jun; Jul–Sep (rendah– sedang)	Dampak lokal terbatas	Monitoring
22	Papua Selatan	Jun; Jul–Okt (panjang)	Hotspot baru; ekspansi karhutla; risiko ekstensifikasi tak terkendali	Early warning; patroli intensif; pengawasan pembukaan lahan
23	Papua (wilayah lainnya)	Variatif	Dampak lokal	Monitoring

Secara umum, Tabel 1 memperlihatkan adanya tiga tingkat prioritas antisipasi.

- **Prioritas pertama** berada pada wilayah gambut berisiko tinggi seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, di mana kombinasi onset kemarau yang lebih dini, durasi tekanan yang panjang, serta tingginya kerentanan karhutla menuntut intervensi aktif seperti pengaturan muka air, sekat kanal, patroli hotspot, dan sistem peringatan dini.
- **Prioritas kedua** berada pada wilayah dengan risiko moderat seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, dan sebagian Sulawesi, yang lebih memerlukan langkah adaptasi agronomis dan konservasi air untuk menjaga produktivitas.
- Sementara itu, **prioritas ketiga** berada pada wilayah dengan dampak yang variatif atau relatif terbatas, seperti Aceh, Maluku, dan sebagian Papua, yang untuk sementara lebih tepat ditempatkan dalam status monitoring.

Pembagian ini menegaskan bahwa respons sektor sawit terhadap musim kemarau 2026 perlu disusun secara bertingkat, berbasis risiko wilayah, dan tidak cukup mengandalkan pendekatan umum yang seragam. Dengan kata lain, efektivitas mitigasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan pelaku dan pengambil kebijakan dalam menyesuaikan strategi antisipasi dengan karakteristik biofisik, tingkat kerentanan, dan intensitas tekanan iklim pada masing-masing wilayah.



BAB 4. OUTLOOK HARGA CPO Q2 2026

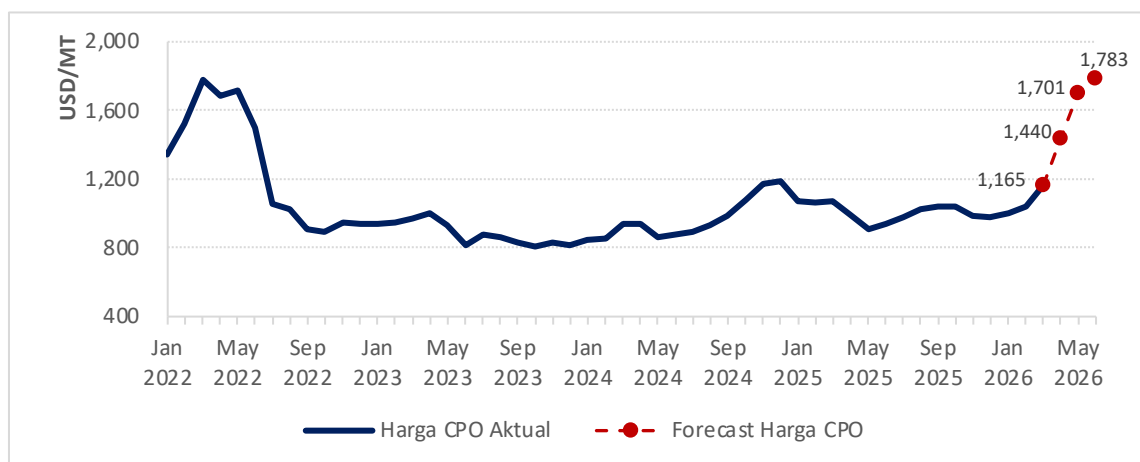
Pada Q2 2026, harga CPO global dan domestik diperkirakan cenderung menguat, terutama didorong oleh kenaikan harga minyak mentah global di tengah eskalasi konflik, perang Iran–Israel–AS di Timur Tengah. Dalam horizon Q2 2026, penguatan harga ini terutama ditransmisikan melalui kanal energi, sementara perbedaan antara skenario B40 dan B50 belum menghasilkan perbedaan harga yang berarti karena alokasi ekspor CPO pada kedua skenario masih sama. Dengan demikian, kenaikan harga CPO pada periode ini lebih tepat dibaca sebagai respons terhadap tekanan energi global dan ekspektasi pasar, dibandingkan sebagai akibat langsung dari perubahan alokasi ekspor domestik.

Proyeksi harga dalam bab ini disusun dengan mempertimbangkan hubungan historis antara harga CPO, harga crude oil, dan dinamika ekspor CPO menggunakan data bulanan periode Januari 2022–Desember 2025. Rentang data ini dipilih karena telah mencakup beberapa episode *shock* penting, baik dari sisi energi global maupun kebijakan domestik, termasuk dampak konflik Rusia–Ukraina pada 2022 dan kebijakan penghentian sementara ekspor CPO Indonesia pada April 2022.

Dengan demikian, pendekatan yang digunakan diharapkan tetap cukup sensitif dalam membaca transmisi tekanan energi global dan dinamika perdagangan terhadap pembentukan harga CPO. Dalam simulasi Q2 2026, harga minyak mentah masih menjadi pendorong utama penguatan harga, sedangkan ekspor berperan sebagai variabel penyeimbang. Namun, karena volume ekspor pada skenario B40 dan B50 belum berbeda, pengaruhnya belum muncul sebagai pembeda harga pada periode proyeksi ini.

4.1 Harga CPO Global

Pergerakan harga CPO global yang digunakan dalam Outlook ini direpresentasikan oleh seri **CIF NW Europe**, yang menjadi salah satu benchmark utama dalam membaca dinamika pasar internasional minyak sawit dan digunakan dalam perhitungan outlook harga. Acuan ini penting karena mencerminkan harga CPO pada salah satu pasar referensi utama perdagangan global, sehingga relevan untuk melihat bagaimana tekanan energi dan geopolitik memengaruhi pembentukan harga internasional. Dalam konteks Q2 2026, penguatan harga global berbasis seri ini menjadi titik awal yang penting, karena dari sinilah tekanan pasar internasional ditransmisikan ke pasar domestik, lalu berlanjut pada pembentukan Harga Referensi (HR), pungutan ekspor, dan bea keluar. Proyeksi harga CPO global selama April–Juni 2026 ditunjukkan pada Gambar 11.



Gambar 11. Harga Aktual dan Proyeksi CPO Global

Sumber: World Bank (2026), diolah

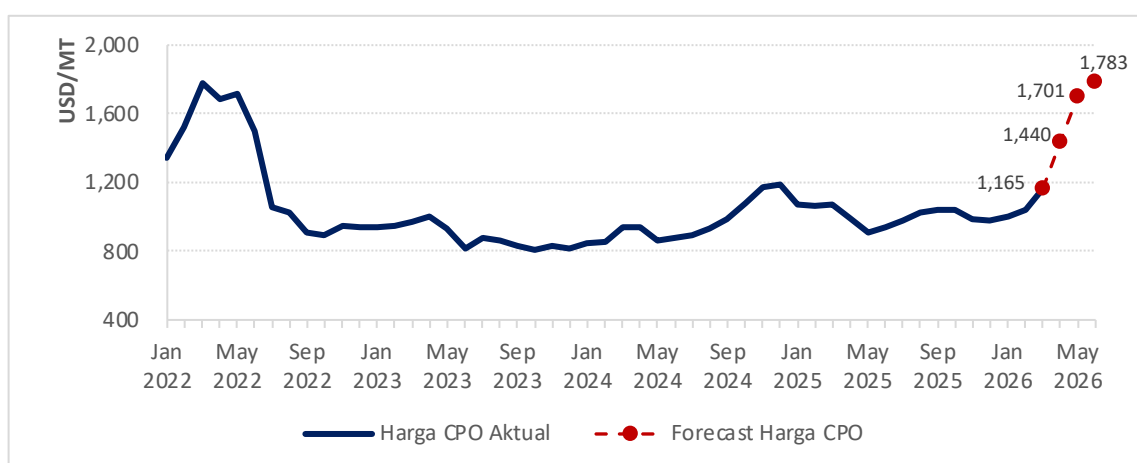
Outlook harga CPO global pada Q2 2026 menunjukkan kecenderungan penguatan yang signifikan. Tekanan utama berasal dari pasar energi, terutama akibat meningkatnya harga minyak mentah dunia di tengah gangguan distribusi dan tingginya premi risiko geopolitik akibat eskalasi konflik, perang Iran-Israel-AS di Timur Tengah. Dalam kondisi seperti ini, pasar minyak nabati, termasuk CPO, ikut merespons karena biodiesel menjadi semakin kompetitif dibandingkan bahan bakar fosil, sementara biaya logistik dan distribusi global juga meningkat.

Pada Maret 2026, harga rata-rata bulanan CPO tercatat sekitar 1.165 USD/ton. Selanjutnya, harga diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 1.440 USD/ton pada April 2026, lalu menguat lagi menjadi sekitar 1.701 USD/ton pada Mei 2026. Pada Juni 2026, harga diperkirakan mencapai sekitar 1.783 USD/ton, mencerminkan berlanjutnya transmisi kenaikan harga energi ke pasar CPO global.

Secara substantif, penguatan ini tidak hanya merefleksikan gejolak geopolitik semata, tetapi juga menggambarkan ekspektasi pasar bahwa ruang pasok minyak nabati menjadi relatif lebih ketat ketika harga energi naik dan permintaan biodiesel menguat. Dengan kata lain, pada Q2 2026 harga CPO global terdorong oleh kombinasi antara faktor energi, biaya logistik, dan persepsi pasar terhadap semakin pentingnya CPO sebagai komoditas substitusi energi.

4.2 Harga CPO Domestik

Untuk melihat bagaimana tekanan harga global ditransmisikan ke pasar domestik, perlu terlebih dahulu dicermati proyeksi pergerakan harga CPO lokal pada Q2 2026. Harga CPO domestik pada Q2 2026 diproyeksikan menguat, namun pembentukannya tidak hanya ditentukan oleh penguatan harga CPO global dan tekanan pasar energi. Dalam konteks Indonesia, harga CPO lokal juga sangat dipengaruhi oleh struktur Harga Referensi (HR), Pungutan Ekspor (PE), dan Bea Keluar (BK) yang membentuk export parity price di pasar domestik. Dengan demikian, ketika harga internasional naik, harga CPO lokal memang ikut terdorong naik, tetapi kenaikannya dibentuk melalui mekanisme neto setelah memperhitungkan pungutan ekspor dan bea keluar. Proyeksi harga CPO domestik selama April–Juni 2026 ditunjukkan pada Gambar 12.



Gambar 12. Harga Aktual dan Proyeksi CPO Domestik

Sumber: GAPKI (2026), diolah

Harga CPO domestik pada Q2 2026 diproyeksikan mengalami penguatan yang cukup signifikan, sejalan dengan kenaikan harga CPO global serta meningkatnya tekanan dari pasar energi. Pada Maret 2026, harga CPO lokal tercatat sekitar **Rp15.065/kg**, lalu diperkirakan naik menjadi sekitar **Rp18.776/kg** pada April 2026. Selanjutnya, harga diproyeksikan meningkat menjadi sekitar **Rp21.182/kg** pada Mei 2026 dan tetap berada pada level tinggi, yakni sekitar **Rp21.392/kg** pada Juni 2026.

Kenaikan harga domestik ini pada dasarnya mencerminkan penguatan harga CPO global dan tekanan dari pasar energi, tetapi dalam konteks Indonesia transmisi tersebut tidak berlangsung secara langsung. Harga CPO lokal terbentuk melalui mekanisme **export parity price**, yaitu harga ekspor yang telah disesuaikan dengan struktur **Harga Referensi (HR)**, **Pungutan Ekspor (PE)**, dan **Bea Keluar (BK)**. Karena itu, ketika harga internasional naik, harga CPO lokal tetap ikut menguat, tetapi besarnya mencerminkan harga netto setelah memperhitungkan pungutan yang berlaku. Dalam hal ini, pembahasan mengenai dinamika HR, PE, dan BK yang memengaruhi pembentukan harga lokal akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab 5.

Di sisi lain, kondisi domestik juga menunjukkan bahwa ruang pasok cenderung tidak terlalu longgar. Sebagaimana dibahas pada Bab 2, produksi nasional pada Q2 2026 diperkirakan sedikit berada di bawah level tahun sebelumnya, sementara konsumsi domestik—khususnya untuk biodiesel—tetap besar dan stok berpotensi menjadi lebih sensitif apabila terjadi percepatan bauran energi.

Dengan demikian, harga CPO domestik pada Q2 2026 lebih tepat dibaca sebagai hasil interaksi antara penguatan harga global, struktur pungutan ekspor yang membentuk harga netto di pasar lokal, serta kondisi **supply-demand** domestik yang mulai menunjukkan ruang gerak yang lebih terbatas.

4.3 Dampak Krisis Energi terhadap Harga Minyak dan CPO

Krisis energi global pada 2026 memperkuat keterkaitan antara harga minyak dan harga CPO. eskalasi konflik, perang Iran–Israel–AS di Timur Tengah meningkatkan risiko gangguan distribusi energi global, terutama melalui jalur strategis seperti Selat Hormuz. Kondisi ini tidak hanya mendorong kenaikan harga minyak mentah, tetapi juga meningkatkan premi risiko logistik, biaya asuransi, dan ketidakpastian pasokan energi di pasar internasional.

Gangguan terhadap distribusi energi global mendorong lonjakan harga minyak mentah, dengan harga Brent sempat mencapai US\$103,78 per barel pada 19 Maret 2026 sebelum turun tipis menjadi US\$99,52 per barel pada 26 Maret 2026 (Investing.com, 2026). Pergerakan ini menunjukkan bahwa pasar masih merespons risiko pasokan secara kuat, meskipun belum seluruh gangguan berkembang menjadi penurunan pasokan fisik yang permanen. Dalam situasi seperti ini, harga energi tetap bergerak pada level tinggi dan menjadi sumber tekanan bagi pasar komoditas lain, termasuk CPO.

Dalam konteks tersebut, pengaruh terhadap CPO terjadi melalui setidaknya tiga saluran utama. Pertama, kenaikan harga minyak mentah meningkatkan daya saing biodiesel relatif terhadap diesel berbasis fosil, sehingga memperkuat permintaan terhadap CPO sebagai bahan baku energi. Kedua, kenaikan biaya logistik dan distribusi global turut meningkatkan biaya perdagangan komoditas, termasuk minyak nabati. Ketiga, ketidakpastian pasokan energi membentuk ekspektasi pasar yang lebih bullish terhadap komoditas substitusi, termasuk CPO.

Sementara itu, sejumlah kilang di Asia yang bergantung pada pasokan minyak dari kawasan Teluk dilaporkan telah menyesuaikan operasi mereka, dengan total penurunan sekitar 3 juta barel per hari atau sekitar 8% dari kapasitas terkait. Bahkan ketika pasokan mulai kembali tersedia, proses pemulihan pengolahan dan distribusi energi tetap membutuhkan waktu, sehingga krisis energi berpotensi berlangsung lebih panjang. Dalam jangka lebih panjang, pasar juga masih menghadapi risiko bahwa produksi global tidak segera kembali ke target semula, yang pada akhirnya dapat mempertahankan harga minyak pada level tinggi dan turut mendorong harga CPO (Widyatama, 2026).

Tekanan ini juga berpotensi bertahan lebih lama apabila proses normalisasi pasar energi berjalan lambat. Bahkan jika jalur distribusi mulai pulih, penyesuaian kembali pada produksi, pengolahan, dan distribusi energi global umumnya tidak berlangsung secara instan. Dalam kondisi demikian, pasar energi dapat tetap berada dalam situasi ketat untuk beberapa waktu, sehingga pengaruhnya terhadap harga minyak dan sentimen pasar komoditas masih berlanjut. Bagi pasar CPO, kondisi ini berarti tekanan harga tidak

hanya muncul akibat shock sesaat, tetapi juga karena ekspektasi bahwa ketidakpastian energi global belum segera mereda.

Dampak tersebut menjadi semakin relevan ketika dibaca bersama fundamental pasar sawit domestik. Pada satu sisi, Bab 2 menunjukkan bahwa pasokan nasional pada Q2 2026 masih tergolong cukup terjaga, tetapi ruang surplus cenderung menyempit. Pada sisi lain, Bab 3 menegaskan bahwa tekanan iklim mulai membentuk risiko produksi yang lebih nyata menuju semester II 2026. Oleh karena itu, krisis energi tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan masuk ke pasar sawit pada saat keseimbangan domestik sudah mulai bergerak ke arah yang lebih ketat. Dalam situasi demikian, harga CPO menjadi lebih sensitif terhadap setiap perubahan pada pasar energi global.

Dengan demikian, penguatan harga CPO pada Q2 2026 tidak perlu menunggu perubahan besar pada alokasi ekspor atau implementasi penuh B50. Harga sudah terdorong naik oleh kombinasi tekanan energi global, penguatan harga minyak mentah, dan kondisi pasar sawit yang menunjukkan ruang pasok semakin terbatas. Sementara itu, kebijakan biodiesel yang lebih agresif tetap perlu diposisikan sebagai faktor penguat tambahan yang berpotensi memperbesar tekanan harga apabila serapan domestik meningkat lebih cepat pada triwulan-triwulan berikutnya.



BAB 5. OUTLOOK PUNGUTAN EKSPOR DAN BEA KELUAR SAWIT Q2 2026

Setelah membahas prospek produksi pada Bab 2, dinamika ekspor pada Bab 3, serta pergerakan harga pada Bab 4, Bab 5 ini memfokuskan analisis pada implikasi biaya perdagangan dan struktur pungutan ekspor dari perubahan pasar global tersebut.

Dalam konteks Q2 2026, penguatan harga CPO yang didorong oleh lonjakan harga energi global dan meningkatnya risiko geopolitik tidak hanya memengaruhi nilai pasar komoditas, tetapi juga berdampak langsung terhadap Harga Referensi (HR) CPO di Indonesia yang menjadi dasar penetapan pajak ekspor: Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK). Dengan demikian, kenaikan harga yang pada satu sisi meningkatkan potensi nilai ekspor, pada sisi lain juga memperbesar beban pungutan yang harus ditanggung eksportir. Inilah salah satu faktor penting yang akan membentuk daya saing ekspor sawit Indonesia pada horizon Q2 2026.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, prospek perdagangan sawit Indonesia pada Q2 2026 dibentuk oleh interaksi antara pasokan domestik, kebutuhan ekspor, dan penguatan harga internasional. Dari sisi produksi, kenaikan output nasional pada semester pertama tahun 2026 diperkirakan tidak terlalu besar, sehingga ruang penyesuaian pasokan tidak sepenuhnya longgar.

Dari sisi ekspor, Indonesia masih memerlukan daya saing harga yang memadai agar posisi di pasar global tetap terjaga. Sementara itu, dari sisi harga, lonjakan crude oil dan meningkatnya premi risiko energi global telah memperkuat harga CPO di berbagai bursa utama. Dalam konteks inilah, perubahan harga global tidak hanya perlu dibaca sebagai peluang peningkatan nilai ekspor, tetapi juga sebagai faktor yang secara otomatis mengerek HR CPO dan mendorong kenaikan pungutan ekspor serta bea keluar.

Q2 2026 menghadirkan tekanan yang tidak ringan bagi industri minyak sawit Indonesia. Lonjakan harga crude oil yang diproyeksikan mencapai US\$119 per barel pada April 2026 dan terus meningkat hingga sekitar US\$163 per barel pada Juni mencerminkan dampak eskalasi konflik, perang Iran-Israel-AS di Timur Tengah terhadap pasar energi global. Dalam kondisi seperti ini, harga referensi CPO diperkirakan bergerak dari sekitar US\$989,64 per ton pada April menjadi US\$1.422,68 per ton pada Juni 2026. Kenaikan ini kemudian diterjemahkan langsung ke dalam struktur pungutan ekspor dan bea keluar, sehingga total pungutan yang harus dibayar eksportir meningkat secara signifikan sepanjang Q2.

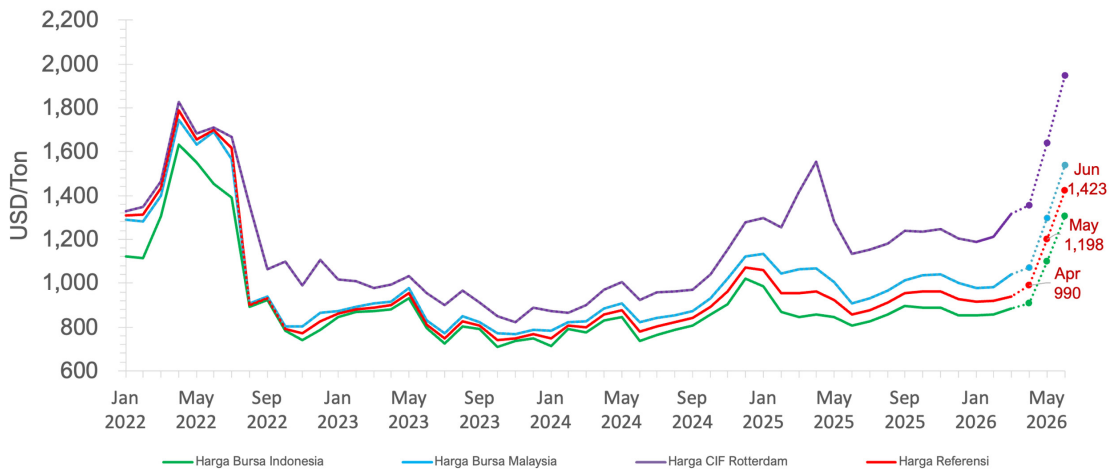
Apabila implementasi kebijakan biodiesel B50 mulai bergerak pada tahun 2026, dampaknya terhadap volume ekspor pada kuartal ini diperkirakan belum menjadi faktor dominan. Dalam jangka pendek pada Q2 2026, perubahan struktur pungutan masih lebih banyak ditentukan oleh penguatan harga global dan transmisinya terhadap HR CPO. Dengan demikian, proyeksi pada bab ini berfokus pada faktor utama yang paling menentukan, yaitu lonjakan harga energi global yang mendorong kenaikan harga CPO di tiga bursa utama—Malaysia, Indonesia, dan Rotterdam—serta konsekuensinya terhadap struktur pungutan ekspor Indonesia.

5.1. Proyeksi Harga Referensi Q2 2026

Sebelum mengidentifikasi besaran pungutan ekspor dan bea keluar, terlebih dahulu perlu dilihat proyeksi Harga Referensi (HR) CPO pada Q2 2026. Proyeksi ini disusun dengan menggunakan basis analisis pemodelan harga CPO sebagaimana juga digunakan dalam Bab 4. HR April hingga Juni 2026 dibangun berdasarkan asumsi penguatan harga *crude oil* akibat tekanan geopolitik global serta perubahan dinamika ekspor CPO. Selanjutnya, perubahan pada variabel-variabel penjelas tersebut ditransmisikan ke dalam

proyeksi harga CPO di tiga bursa utama—Indonesia, Malaysia, dan Rotterdam—untuk kemudian dihitung menjadi HR sesuai formula yang berlaku.

Dengan demikian, angka-angka proyeksi yang dihasilkan tidak dimaksudkan sebagai prediksi pasti, melainkan sebagai gambaran terukur mengenai arah perubahan HR dan implikasinya terhadap struktur pungutan ekspor pada Q2 2026. Hal ini penting karena HR merupakan dasar utama penetapan pungutan ekspor dan bea keluar. Proyeksi pergerakan HR selama April–Juni 2026 ditunjukkan pada Gambar 13.



Gambar 13. Proyeksi Q2 2026 untuk Harga Referensi CPO, Harga CPO Bursa Indonesia, Bursa Malaysia, dan CIF Rotterdam

Sumber: IPOSS

Harga referensi April 2026 diperkirakan berada pada kisaran US\$990 per ton. Perhitungan ini didasarkan pada data bursa periode 20 Februari hingga 19 Maret 2026, dengan perkiraan harga CPO Malaysia sebesar US\$1.070,81 per ton, Indonesia US\$908,47 per ton, dan Rotterdam US\$1.354,49 per ton. Nilai tersebut diperoleh dari rata-rata antara harga median dan harga terdekat median dari bursa Indonesia (ICDX), bursa Malaysia (BMD), dan CIF Rotterdam, sesuai mekanisme regulasi Permendag Nomor 35 Tahun 2025.

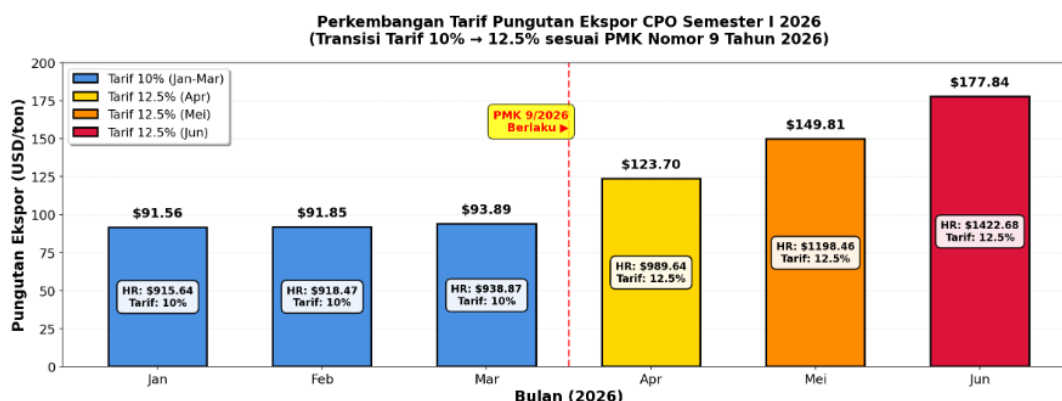
Selanjutnya, harga referensi diproyeksikan meningkat menjadi US\$1.198 per ton pada Mei dan US\$1.423 per ton pada Juni 2026. Kenaikan ini mencerminkan berlanjutnya tekanan pada pasar energi global, terutama akibat ketidakpastian geopolitik yang belum mereda. Dalam kerangka Outlook ini, penguatan HR menunjukkan bahwa harga CPO Indonesia masih akan sangat sensitif terhadap pergerakan crude oil dan sentimen pasar energi. Artinya, dinamika harga yang dibahas pada Bab 4 tidak hanya relevan bagi prospek nilai ekspor, tetapi juga menjadi faktor kunci yang menentukan besarnya pungutan ekspor dan bea keluar pada Q2 2026.

Dengan kata lain, kenaikan harga global membawa dua konsekuensi sekaligus. Pertama, ia berpotensi menopang nilai ekspor sawit Indonesia. Kedua, ia secara otomatis meningkatkan HR yang menjadi dasar pengenaan pungutan ekspor dan bea keluar. Dalam situasi ini, eksportir menghadapi kondisi yang paradoks: pasar sedang *bullish*, tetapi biaya ekspor juga naik secara tajam.

5.2. Identifikasi Pungutan Ekspor dan Bea Keluar dari Proyeksi Harga Referensi

Proyeksi kenaikan Harga Referensi sepanjang Q2 2026 berdampak langsung terhadap struktur pungutan ekspor CPO. Pungutan ekspor dihitung sebesar 12,5% dari HR sesuai PMK Nomor 9 Tahun 2026, sehingga besarnya mengikuti pergerakan harga referensi: sekitar US\$123,70 per ton pada April, US\$149,81 per ton pada Mei, dan US\$177,84 per ton pada Juni. April 2026 sekaligus menandai transisi penting dari tarif lama 10% yang berlaku pada Q1 menuju tarif baru 12,5% pada Q2. Karena itu, lonjakan pungutan ekspor

dari Maret ke April bukan hanya disebabkan oleh kenaikan harga referensi, tetapi juga oleh perubahan tarif itu sendiri.

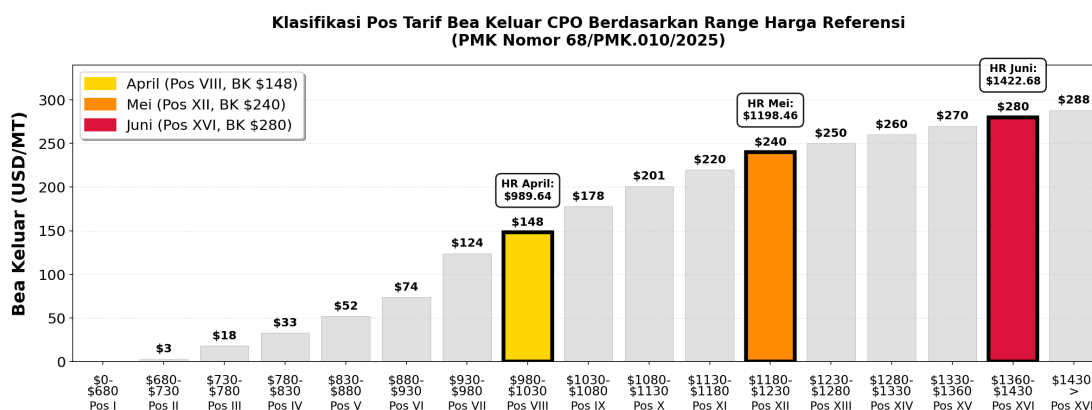


Gambar 14. Perkembangan Tarif PE CPO Semester I 2026

Sumber: IPOSS

Sementara itu, bea keluar mengalami kenaikan yang lebih progresif karena mengikuti mekanisme Pos Tarif sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 68/PMK.010/2025. Dalam skema tersebut, besaran bea keluar meningkat secara bertahap dari US\$0 pada Pos 1 hingga maksimum US\$288 per ton pada Pos 17, seiring dengan kenaikan Harga Referensi (HR) CPO dalam interval sekitar US\$50 per ton.

Berdasarkan proyeksi HR pada Q2 2026, posisi tarif diperkirakan bergerak dari Pos 8 pada April dengan BK sebesar US\$148 per ton, melonjak ke Pos 12 pada Mei dengan BK sebesar US\$240 per ton, lalu naik lagi ke Pos 16 pada Juni 2026 dengan BK sebesar US\$280 per ton (lihat Tabel 2). Pergeseran yang relatif cepat ini menunjukkan bahwa volatilitas harga global tidak hanya memengaruhi pasar, tetapi juga secara langsung memperbesar beban pungutan ekspor dalam waktu yang singkat.



Gambar 15. Klasifikasi Pos Tarif BK CPO

Sumber: IPOSS

Kombinasi kenaikan pungutan ekspor dan bea keluar menyebabkan total pungutan meningkat dari US\$217,89 per ton pada Maret 2026 menjadi US\$271,70 per ton pada April, kemudian naik tajam menjadi US\$389,81 per ton pada Mei, dan mencapai US\$457,84 per ton pada Juni 2026. Dengan demikian, total pungutan pada April tercatat meningkat 24,7% dibandingkan Maret, lalu melonjak menjadi 78,9% pada Mei dan 110,1% pada Juni.

Kenaikan yang sangat cepat ini menunjukkan bahwa penguatan harga global tidak hanya meningkatkan nilai pasar CPO, tetapi juga secara langsung memperbesar beban pungutan bagi industri ekspor dalam

waktu singkat. Bagi eksportir, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan likuiditas, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki ruang penyesuaian harga terbatas atau kontrak perdagangan jangka pendek yang sensitif terhadap perubahan biaya.

Tabel 2. Rangkuman HR, PE, dan BK Q2 2026

Periode	Proyeksi Harga Referensi (USD/ton)	Proyeksi Pungutan Ekspor (USD/ton)	Proyeksi Bea Keluar (Pos Tarif)	Total Pungutan	vs Maret
Maret 2026	\$938,87	\$93,89	\$124 (Pos 7)	\$217,89	-
April 2026	\$989,64	\$123,70	\$148 (Pos 8)	\$271,70	+24.7%
Mei 2026	\$1.198,46	\$149,81	\$240 (Pos 12)	\$389,81	+78.9%
Juni 2026	\$1.422,68	\$177,84	\$280 (Pos 16)	\$457,84	+110.1%

Sumber: IPOSS (2026)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tekanan utama pada Q2 2026 tidak hanya berasal dari volatilitas pasar internasional, tetapi juga dari bagaimana volatilitas itu diterjemahkan ke dalam struktur pungutan domestik. Bagi Indonesia, situasi ini menimbulkan trade-off yang nyata. Di satu sisi, kenaikan harga global meningkatkan potensi nilai ekspor dan penerimaan negara. Namun di sisi lain, kenaikan pungutan dapat mengurangi fleksibilitas harga ekspor dan berpotensi menekan daya saing, terutama bila negara pesaing tidak menghadapi beban biaya ekspor dengan intensitas yang sama.

5.3 Implikasi terhadap Daya Saing Ekspor Sawit

Dalam kaitannya dengan Bab 2, kenaikan pungutan ekspor dan bea keluar perlu dibaca sebagai faktor yang dapat memengaruhi strategi perdagangan sawit Indonesia selama Q2 2026. Sebagaimana ditunjukkan dalam pembahasan *supply-demand*, ruang pasok domestik pada periode ini tidak sepenuhnya longgar, sementara ekspor tetap menjadi salah satu komponen penting dalam keseimbangan pasar. Dalam kondisi seperti ini, meskipun penguatan harga internasional berpotensi menopang nilai ekspor, peningkatan biaya ekspor per ton dapat menggerus sebagian manfaat tersebut di tingkat pelaku usaha. Artinya, kenaikan nilai ekspor secara *bruto* belum tentu sepenuhnya diterjemahkan menjadi kenaikan margin bersih yang sepadan. Bagi eksportir, penyesuaian strategi *pricing* akan menjadi semakin penting agar produk Indonesia tetap kompetitif di tengah pasar global yang juga bergerak dinamis.

Dalam kaitannya dengan Bab 3, tekanan pungutan ini juga perlu dibaca bersama meningkatnya risiko iklim terhadap produksi sawit. Transisi menuju kondisi yang lebih kering, potensi kemarau yang datang lebih awal, serta tekanan terhadap produktivitas di sejumlah sentra utama menunjukkan bahwa ruang pasok pada semester berikutnya berpotensi menjadi lebih sensitif. Dengan demikian, kenaikan pungutan ekspor tidak berdiri sendiri, melainkan terjadi pada saat industri juga menghadapi potensi tekanan produksi yang dapat mempersempit fleksibilitas pasokan. Kondisi ini membuat daya saing ekspor semakin ditentukan oleh kemampuan Indonesia menjaga keseimbangan antara pengelolaan pasokan, kebutuhan domestik, dan struktur biaya perdagangan.

Sementara itu, sebagaimana dibahas pada Bab 4, penguatan harga CPO yang dipicu oleh lonjakan *crude oil* memang membuka peluang bagi penguatan nilai pasar. Namun Bab 5 menunjukkan bahwa penguatan harga tersebut sekaligus memunculkan kenaikan pungutan ekspor dan bea keluar yang tidak kecil. Karena itu, prospek perdagangan sawit Indonesia pada Q2 2026 tidak dapat dibaca hanya dari arah pasar yang *bullish*. Ia juga harus dilihat dari seberapa besar beban pungutan yang menyertai fase kenaikan harga tersebut.

Secara keseluruhan, outlook pungutan ekspor dan bea keluar sawit pada Q2 2026 menunjukkan bahwa penguatan harga global tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi keuntungan bersih yang lebih besar

bagi pelaku ekspor. Kenaikan HR memang mencerminkan pasar yang bullish, tetapi pada saat yang sama memicu lonjakan pungutan ekspor dan bea keluar yang memperbesar beban ekspor bagi industri. Dalam situasi ini, eksportir Indonesia menghadapi *trade-off* yang semakin nyata antara peluang memperoleh nilai ekspor yang lebih tinggi dan kewajiban menanggung pungutan yang lebih besar. Karena itu, sebagaimana berkaitan dengan pembahasan *supply-demand*, iklim, dan harga pada bab-bab sebelumnya, prospek perdagangan sawit Indonesia pada Q2 2026 perlu dibaca bukan hanya dari arah harga, tetapi juga dari struktur biaya ekspor yang menyertainya.

5.4 Implikasi terhadap Harga TBS dan Posisi Petani

Kenaikan pungutan ekspor dan bea keluar pada Q2 2026 tidak hanya berdampak pada eksportir, tetapi juga berpotensi memengaruhi pembentukan harga di sepanjang rantai pasok sawit domestik. Dalam praktiknya, peningkatan PE dan BK menambah beban biaya pada perdagangan CPO, sehingga memengaruhi harga efektif CPO lokal yang menjadi acuan bagi industri pengolahan. Ketika harga neto CPO yang diterima pelaku usaha dibentuk setelah memperhitungkan pungutan ekspor dan bea keluar, ruang bagi pabrik kelapa sawit (PKS) untuk membeli Tandan Buah Segar (TBS) petani dengan harga yang lebih tinggi menjadi lebih terbatas.

Dalam konteks tersebut, tekanan akibat PE dan BK dapat ditransmisikan secara tidak langsung ke tingkat hulu, termasuk kepada petani. PKS pada dasarnya membentuk harga beli TBS dengan mempertimbangkan harga jual CPO, rendemen, biaya pengolahan, efisiensi operasional, serta berbagai komponen biaya lainnya. Oleh karena itu, ketika beban pungutan meningkat, sebagian ruang margin yang seharusnya dapat diterjemahkan menjadi harga beli TBS yang lebih baik menjadi menyempit. Dengan kata lain, kenaikan PE dan BK berpotensi menahan laju kenaikan harga TBS di tingkat petani.

Namun demikian, kondisi tersebut perlu dibaca secara proporsional. Pada Q2 2026, harga CPO lokal juga diproyeksikan meningkat cukup kuat, dari sekitar Rp15.065/kg pada Maret menjadi sekitar Rp18.776/kg pada April, Rp21.182/kg pada Mei, dan tetap berada pada kisaran Rp21.400/kg pada Juni. Pergerakan ini menunjukkan bahwa meskipun PE dan BK menambah beban dalam sistem industri sawit secara keseluruhan, harga TBS yang diterima petani tetap berpotensi meningkat karena ditopang oleh level harga CPO domestik yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.

Dengan demikian, implikasi utama dari kenaikan pungutan bukanlah menurunkan harga TBS secara absolut, melainkan lebih pada mengurangi besaran manfaat yang seharusnya dapat diterima petani apabila kenaikan harga CPO lokal ditransmisikan secara lebih penuh. Namun demikian, pungutan ekspor tidak semata-mata berhenti sebagai beban di tingkat industri. Dalam sistem kelembagaan sawit nasional, penerimaan dari pungutan ekspor menjadi sumber pendanaan BPDP untuk membiayai berbagai program strategis di dalam negeri, termasuk dukungan terhadap program biodiesel yang selama ini berperan penting dalam menjaga permintaan domestik dan menopang stabilitas harga CPO. Di samping itu, dana tersebut juga digunakan untuk membiayai berbagai program sawit lainnya yang bermanfaat, seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), beasiswa sawit, serta bantuan sarana dan prasarana bagi petani.

Meskipun dalam jangka pendek PE dan BK dapat menekan ruang transmisi harga ke tingkat hulu, dalam perspektif yang lebih luas instrumen tersebut justru berkontribusi terhadap pembentukan penyangga pasar sawit nasional. Oleh karena itu, pembacaan terhadap outlook pungutan ekspor pada Q2 2026 perlu mempertimbangkan tidak hanya beban yang muncul di tingkat industri dan petani, tetapi juga bagaimana penerimaan dari pungutan tersebut kembali digunakan untuk menopang keberlanjutan dan stabilitas industri sawit secara keseluruhan.

5.5 Implikasi terhadap Pasar Domestik dan Stabilitas Harga Minyak Goreng

Perubahan harga referensi CPO serta penyesuaian instrumen pungutan ekspor dan bea keluar tidak hanya berdampak terhadap daya saing ekspor dan penerimaan negara, tetapi juga memiliki implikasi terhadap pasar domestik. Dalam konteks ini, salah satu aspek yang perlu dicermati adalah stabilitas pasokan dan harga minyak goreng, mengingat komoditas ini memiliki dimensi ekonomi sekaligus sosial yang sangat sensitif. Ketika harga CPO bergerak naik dan ruang pasok domestik menjadi lebih ketat, perhatian terhadap pasar minyak goreng menjadi semakin relevan sebagai bagian dari pembacaan yang lebih utuh terhadap arah industri sawit.

Secara umum, penguatan harga CPO dan pengetatan keseimbangan *supply-demand* domestik dapat meningkatkan tekanan terhadap biaya bahan baku industri minyak goreng. Kondisi ini menjadi semakin penting ketika konsumsi domestik untuk biodiesel tetap tinggi, sementara ruang surplus pasokan tidak bertambah secara sepadan. Dalam situasi seperti itu, kompetisi alokasi minyak sawit di dalam negeri berpotensi meningkat, baik untuk kebutuhan energi, ekspor, maupun pangan. Namun demikian, hubungan antara kenaikan harga CPO dan harga minyak goreng domestik tidak bersifat linear maupun otomatis, karena dipengaruhi pula oleh struktur rantai pasok, distribusi, margin usaha, serta kebijakan stabilisasi yang berlaku.

Dalam praktiknya, stabilitas harga minyak goreng domestik sangat bergantung pada efektivitas instrumen pengamanan pasokan dalam negeri. Oleh karena itu, kenaikan harga CPO tidak serta-merta diterjemahkan menjadi lonjakan harga minyak goreng pada tingkat konsumen. Meski demikian, apabila tekanan harga berlangsung secara persisten dan pasar domestik bergerak semakin ketat, maka kemampuan kebijakan stabilisasi dalam menahan transmisi harga akan sangat bergantung pada kecukupan pasokan, disiplin implementasi, serta respons pelaku usaha di sepanjang rantai distribusi.

Dengan demikian, implikasi kenaikan harga CPO pada Q2 2026 perlu dibaca secara lebih luas, tidak hanya dari sisi ekspor dan biodiesel, tetapi juga dari sisi stabilitas pasar pangan domestik. Dalam konteks ini, keseimbangan antara kepentingan ekspor, energi, dan kebutuhan pangan dalam negeri menjadi semakin penting. Oleh karena itu, perkembangan harga minyak goreng pada Q2 2026 layak ditempatkan sebagai area yang perlu dicermati secara hati-hati dalam perumusan respons kebijakan.



BAB 6. SAWIT INDONESIA DALAM DINAMIKA PERDAGANGAN DAN GEOPOLITIK GLOBAL

6.1. Peluang Pasar Sawit Indonesia Pasca Agreement on Reciprocal Trade (ART)

Amerika Serikat merupakan salah satu konsumen minyak nabati terbesar di dunia dengan konsumsi yang didominasi oleh *soybean oil* yang diproduksi secara domestik. Namun demikian, AS tetap mengimpor berbagai jenis minyak nabati dan turunannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan industri seperti pangan dan oleokimia. Sebagai salah satu eksportir utama minyak sawit ke pasar Amerika Serikat, Indonesia memiliki posisi penting dalam struktur perdagangan minyak nabati di negara tersebut sehingga setiap dinamika kebijakan perdagangan AS berpotensi memengaruhi kinerja ekspor sawit Indonesia.

Pada 19 Februari 2026, Indonesia dan AS sepakat menandatangani *Agreement between the US and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade* (ART) yang mencakup eliminasi tarif AS atas 1.819 produk Indonesia, termasuk produk sawit. Kesepakatan ini penting karena sebelumnya Amerika Serikat telah memberlakukan tarif resiprokal terhadap sejumlah produk Indonesia yang mencapai 19%, sehingga meningkatkan beban tarif bagi eksportir Indonesia ke pasar AS. Melalui ART, tarif tambahan tersebut dihapus sehingga struktur tarif kembali lebih rendah dan stabil. Produk mentah seperti CPO tetap dikenakan tarif 0%, sementara produk refined dan oleofood mendapat penurunan tarif menjadi 0%. Di sisi lain, beberapa produk oleokimia juga memperoleh penurunan tarif menjadi 0%, meskipun sebagian lainnya masih berada pada tingkat tarif sebesar 5%.

Untuk menilai posisi daya saing sawit Indonesia di pasar Amerika Serikat, struktur tarif perlu dilihat secara komparatif terhadap minyak nabati lain yang dipasok oleh negara eksportir utama. Perbandingan tarif tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Tarif Impor Minyak Nabati di Pasar Amerika Serikat dari Eksportir Utama

Jenis minyak nabati	Eksportir utama ke AS	HS Code 6 Digit	Volume ekspor ke AS 2025 (Ton)	MFN Rate 2025
Soybean oil	Kanada	150710	127.762	9,55%
		150790		19,1%
Palm oil (CPO + CPKO and its fractions)	Indonesia	151110	1.615.485	0%
		151190		0-5%
		151321		
		151329		
Rapeseed oil	Kanada	151410	2.485.084	5,8%
		151419		3,2%
		151411		
		151490		
		151491 151499		3,2-6,4%
Sunflower oil	Ukraina	151211	43.333	4,09%
		151219		4,24%

Sumber: ITC (2026); United States International Trade Commission (2026); United States Trade Representative (2026)

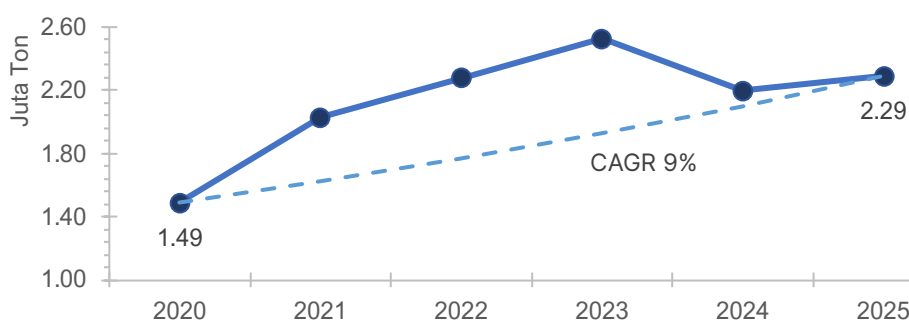
Secara umum, struktur tarif impor minyak nabati di Amerika Serikat tercermin dari *Most-Favoured Nation (MFN) rate*, yaitu tarif dasar yang berlaku bagi seluruh negara anggota WTO tanpa preferensi perdagangan khusus. Beberapa produk *palm oil* seperti CPO dan sebagian fraksinya dikenakan tarif MFN sebesar 0–5%, sementara minyak nabati lain umumnya memiliki MFN rate yang bervariasi. Dalam praktiknya, tarif yang benar-benar dikenakan atau *applied tariff* dapat lebih rendah dari MFN apabila suatu negara memperoleh preferensi melalui perjanjian perdagangan seperti Free Trade Agreement (FTA) atau kesepakatan bilateral seperti Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Berdasarkan Tabel 3, struktur tarif impor minyak nabati di Amerika Serikat menunjukkan variasi yang cukup besar antar produk dan negara pemasok. Kanada sebagai eksportir utama *soybean oil* dan *rapeseed oil* secara formal menghadapi tarif MFN yang relatif tinggi, masing-masing berkisar antara 9,55%–19,1% untuk *soybean oil* dan 3,2%–6,4% untuk *rapeseed oil*. Namun demikian, melalui preferensi perjanjian dagang regional United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA), produk-produk tersebut pada praktiknya dapat masuk ke pasar AS dengan tarif 0%. Sebaliknya, Ukraina sebagai pemasok utama *sunflower oil* tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat, sehingga ekspornya dikenakan tarif sesuai MFN rate, yaitu sekitar 4%.

Sementara itu, Indonesia sebagai pemasok utama *palm oil* menghadapi struktur tarif yang relatif lebih rendah, dengan tarif MFN sebesar 0% untuk produk mentah (CPO) dan berkisar 0–5% untuk produk turunannya. Melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART), sebagian produk sawit Indonesia memperoleh penurunan tarif sehingga memperkuat posisi tarifnya di pasar Amerika Serikat. Kondisi ini menempatkan produk sawit Indonesia pada tingkat tarif yang relatif kompetitif dibandingkan minyak nabati lain di pasar Amerika Serikat. Dengan struktur tarif yang lebih rendah pasca-ART, peluang peningkatan daya saing ekspor sawit Indonesia menjadi semakin terbuka, terutama apabila didukung oleh faktor harga, efisiensi produksi, serta kesiapan industri dalam memenuhi permintaan pasar.

Adanya peluang daya saing melalui penurunan tarif tersebut menjadi semakin relevan mengingat minyak sawit Indonesia merupakan salah satu komoditas minyak nabati yang diimpor dalam volume besar oleh Amerika Serikat. Pada tahun 2025, ekspor minyak sawit Indonesia (belum termasuk produk oleokimia dan biodiesel) ke Amerika Serikat mencapai sekitar 1,6 juta ton, menjadikannya salah satu sumber pasokan minyak nabati terbesar di pasar tersebut. Volume ini jauh melampaui impor minyak nabati lain dari beberapa negara pemasok utama, seperti *sunflower oil* dari Ukraina yang hanya sekitar 43 ribu ton maupun *soybean oil* dari Kanada yang sekitar 127 ribu ton pada periode yang sama. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun konsumsi minyak nabati AS didominasi oleh produksi domestik *soybean oil*, kebutuhan industri pangan dan oleokimia tetap bergantung pada impor minyak sawit Indonesia dalam jumlah yang signifikan.

Dinamika perdagangan dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan peran penting pasar Amerika Serikat bagi ekspor sawit Indonesia. Selama periode 2020–2025, ekspor sawit Indonesia ke pasar AS meningkat dari sekitar 1,49 juta ton menjadi 2,28 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 9% per tahun.



Gambar 16. Volume Ekspor Sawit Indonesia ke Amerika

Sumber: (BPS, 2026a)

Struktur ekspor juga semakin bergeser dari produk mentah menuju produk bernilai tambah seperti *refined palm oil* dan berbagai produk oleokimia. Beberapa produk turunan seperti *fatty acids*, *glycerol*, *palmitic acid*, dan *stearic acid* bahkan mencatat pertumbuhan dua digit dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini menunjukkan bahwa produk hilir sawit Indonesia semakin terserap oleh pasar Amerika Serikat. Dengan stabilitas dan penurunan tarif setelah diberlakukannya ART, kondisi tersebut membuka peluang yang lebih besar bagi peningkatan ekspor produk hilir sawit Indonesia ke pasar AS.

Meski demikian, peluang tarif yang terbuka pasca-ART perlu dibaca secara hati-hati karena tidak secara otomatis akan bermuara pada kenaikan ekspor sawit Indonesia ke pasar Amerika Serikat. Hasil akhirnya tetap akan sangat ditentukan oleh daya saing harga produk Indonesia, kesiapan ekspor produk hilir, perkembangan permintaan pasar AS, serta kondisi pasokan domestik di dalam negeri. Dalam konteks Q2 2026, faktor terakhir ini menjadi semakin penting, mengingat ruang pasok nasional juga berpotensi dipengaruhi oleh penguatan program biodiesel yang dapat memperketat alokasi minyak sawit antara kebutuhan ekspor, energi, dan pasar domestik.

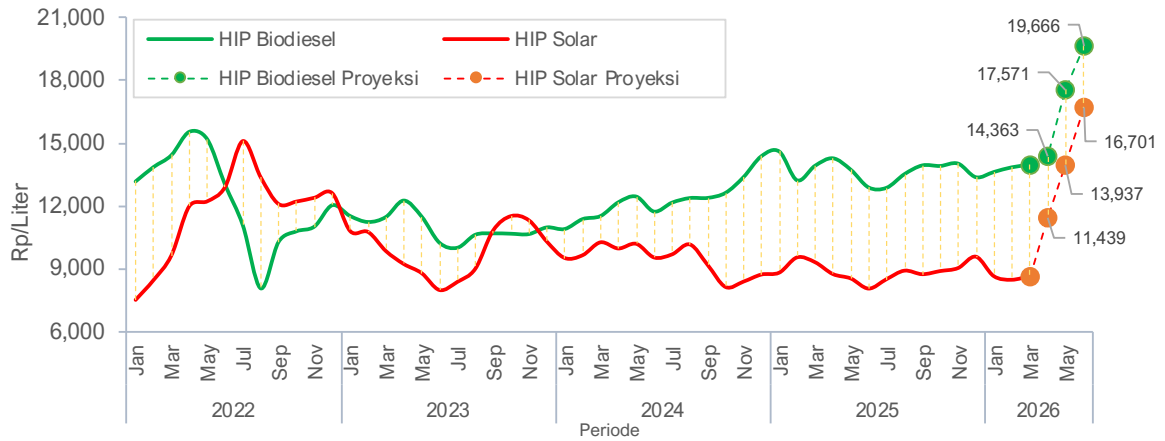
6.2 Dampak Kenaikan Harga Crude Oil terhadap Pengurangan Insentif Biodiesel

Untuk menilai dampak lanjutan dari dinamika energi global terhadap program biodiesel nasional, analisis tidak cukup berhenti pada proyeksi harga *crude oil* dan CPO semata. Kedua variabel tersebut perlu diterjemahkan lebih lanjut ke dalam proyeksi harga solar dan biodiesel di dalam negeri, karena hubungan antara keduanya akan menentukan besaran insentif yang diperlukan dalam pelaksanaan mandatori biodiesel pada Q2 2026. Dalam konteks ini, kenaikan harga *crude oil* menjadi faktor penting karena secara langsung memengaruhi harga BBM solar, sementara pergerakan harga CPO lokal menjadi penentu utama bagi pembentukan harga biodiesel.

Berdasarkan hasil proyeksi, harga solar diperkirakan mengalami kenaikan yang cukup signifikan seiring dengan penguatan harga minyak mentah global pada Q2 2026. Di sisi lain, harga biodiesel juga meningkat mengikuti tren kenaikan harga CPO lokal, namun dengan pola yang berbeda. Dengan demikian, dinamika keekonomian biodiesel pada periode ini tidak hanya ditentukan oleh arah kenaikan harga masing-masing komoditas, tetapi terutama oleh perubahan selisih harga antara HIP Biodiesel dan HIP Solar. Selisih inilah yang pada dasarnya menjadi dasar kebutuhan insentif dalam skema mandatori biodiesel.

Hasil proyeksi pada Gambar 17 menunjukkan bahwa HIP Biodiesel tetap berada di atas HIP Solar sepanjang horizon proyeksi, namun pergerakan keduanya menunjukkan tren kenaikan yang sama-sama kuat. Pada periode proyeksi Q2 2026, HIP Biodiesel diperkirakan meningkat dari Rp. 13.978 per liter pada bulan Maret 2026 naik menjadi sekitar Rp14.363 per liter pada April, kemudian naik lagi menjadi Rp17.571 per liter pada Mei 2026, dan selanjutnya mencapai Rp19.666 per liter pada Juni 2026. Sementara itu, HIP Solar diproyeksikan naik drastis dari sekitar 8.651 per liter pada Maret 2026 menjadi Rp11.439 per liter pada April 2026, kemudian naik lagi menjadi Rp13.937 per liter pada Mei 2026 dan meningkat lebih lanjut hingga sekitar Rp16.701 per liter pada Juni 2026.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun harga biodiesel tetap lebih tinggi, harga solar juga bergerak naik lebih signifikan mengikuti penguatan harga energi global, sehingga mulai terlihat adanya penyempitan selisih harga yang semakin menahan tekanan terhadap kebutuhan insentif biodiesel. Dalam konteks ini, kenaikan harga energi fosil justru membuat biodiesel relatif lebih kompetitif dibandingkan ketika harga solar berada pada level rendah. Artinya, ruang pembiayaan yang harus disediakan untuk menjaga implementasi mandatori biodiesel menjadi lebih terkendali. Namun demikian, perbaikan tersebut masih bersifat relatif dan temporer, karena pada saat yang sama harga biodiesel juga terdorong naik oleh penguatan harga CPO lokal.



Gambar 17. Tren Perbandingan HIP Biodiesel dan Solar

Sumber: Investing.com (2026); Kementerian ESDM (2026) diolah

Dari perbandingan tersebut terlihat bahwa selisih harga antara biodiesel dan solar masih berada pada kisaran yang relatif lebar, namun secara umum menunjukkan kecenderungan menyempit dibandingkan posisi awal sebelum memasuki Q2 2026. Selisih harga tercatat sekitar Rp5.327 per liter pada Maret 2026, kemudian turun menjadi sekitar Rp2.924 per liter pada April 2026. Meskipun pada Mei 2026 gap diperkirakan sempat melebar kembali ke sekitar Rp3.634 per liter, pada Juni 2026 selisih tersebut kembali menyempit menjadi sekitar Rp2.965 per liter.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa kenaikan harga solar yang lebih cepat dibandingkan biodiesel telah membantu menahan tekanan terhadap kebutuhan insentif. Dalam konteks program mandatori, kondisi tersebut menjadi penting karena semakin kecil selisih antara HIP Biodiesel dan HIP Solar, semakin rendah pula insentif yang perlu disediakan untuk menjaga daya saing biodiesel di pasar domestik.

Dengan demikian jika dilihat secara keseluruhan, dinamika harga pada Q2 2026 menunjukkan bahwa program biodiesel masih memperoleh ruang keberlanjutan jangka pendek dari kenaikan harga energi global, karena penyempitan relatif selisih harga biodiesel dan solar dapat membantu menahan beban insentif. Namun, ruang keringanan ini tidak boleh dibaca sebagai tanda bahwa fondasi program biodiesel telah sepenuhnya kuat. Bagi industri sawit secara keseluruhan, penguatan biodiesel memang memperbesar peran strategis sawit dalam ketahanan energi nasional dan memperkuat permintaan domestik, tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan tekanan terhadap keseimbangan pasok nasional. Dalam jangka menengah, keberlanjutan program ini tidak hanya ditentukan oleh hubungan harga biodiesel dan solar, melainkan juga oleh kemampuan industri sawit menyediakan bahan baku secara memadai, menjaga keseimbangan antara energi, ekspor, dan pangan, serta membangun sistem industri penunjang yang lebih mandiri. Oleh karena itu, analisis perlu dilanjutkan pada dimensi yang lebih struktural, yakni sejauh mana program biodiesel benar-benar ditopang oleh kesiapan industri domestik secara menyeluruh.

6.3. Tantangan Struktural Program Biodiesel di Tengah Ketidakpastian Geopolitik

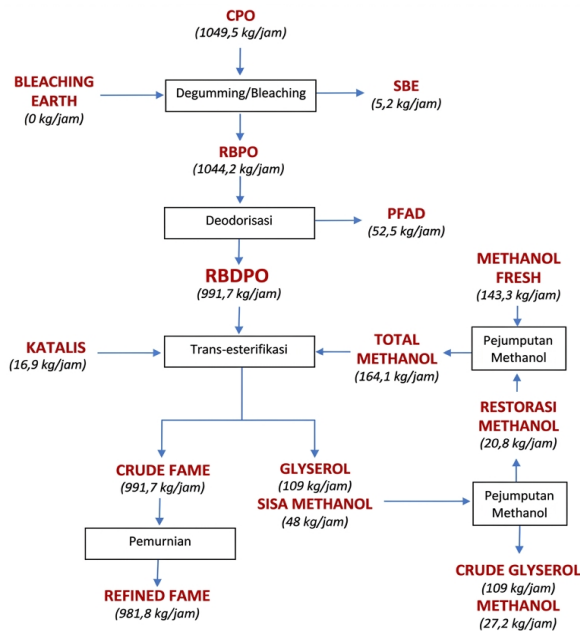
Penyempitan selisih harga biodiesel dan solar pada Q2 2026 menunjukkan adanya ruang keringanan fiskal bagi mandatori program biodiesel. Akan tetapi, keberlanjutan biodiesel tidak hanya ditentukan oleh pergerakan harga, melainkan juga oleh kekuatan struktur industrinya. Dalam konteks inilah, analisis perlu bergeser dari persoalan keekonomian jangka pendek menuju tantangan yang lebih struktural, terutama terkait ketergantungan pada input produksi yang belum sepenuhnya dikuasai di dalam negeri.

Di tengah meningkatnya relevansi biodiesel sebagai instrumen ketahanan energi nasional, implementasi program biodiesel Indonesia pada kenyataannya masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang bersifat mendasar. Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, kenaikan harga energi global memang dapat mempersempit selisih harga antara biodiesel dan solar, sehingga secara ekonomi membuka ruang bagi penguatan mandatori biodiesel. Namun demikian, dorongan tersebut tidak sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan sistem produksi biodiesel secara menyeluruh.

Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel telah mendorong kenaikan harga minyak mentah serta mempersempit selisih harga antara biodiesel dan solar. Kondisi ini secara ekonomi membuka ruang bagi percepatan implementasi mandatori biodiesel, termasuk potensi peningkatan menuju B50 (OPIS, 2026). Namun demikian, dorongan tersebut tidak sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan sistem produksi biodiesel secara menyeluruh.

Secara teknis, produksi biodiesel (FAME) merupakan proses konversi berbasis reaksi transesterifikasi yang tidak hanya bergantung pada ketersediaan CPO, tetapi juga membutuhkan input penunjang yang bersifat kritikal, terutama methanol (CH_3OH) dan katalis berbasis sodium methylate (NaOCH_3) disebut juga SMO. Struktur kebutuhan ini dapat dijelaskan melalui neraca massa proses produksi biodiesel sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 18.

Berdasarkan neraca massa tersebut, dapat dilihat setiap pengolahan sekitar 1 ton CPO membutuhkan sekitar 0,15–0,16 ton methanol dan sekitar 0,016 ton katalis dalam proses transesterifikasi. Kedua input ini bersifat inheren dalam proses produksi dan akan meningkat secara proporsional seiring ekspansi program biodiesel. Maka diperkirakan untuk menjalankan pengolahan 16 juta ton CPO untuk menjadi biodiesel, maka dibutuhkan 2,5 juta ton methanol dan 0,26 juta ton katalis SMO, lihat Tabel 4.



Gambar 18. Neraca Massa Konversi CPO menjadi Biodiesel (FAME)

Sumber: (LPEM FEB UI, 2020)

Untuk memberikan gambaran kuantitatif, Tabel berikut menunjukkan estimasi kebutuhan bahan baku pada dua skenario kebijakan biodiesel.

Tabel 4. Estimasi Kebutuhan Bahan Baku Biodiesel pada Skenario B40 dan B50

Skenario Biodiesel	FAME (kL)	CPO (ton)	Methanol (ton)	Katalis/ SMO (ton)
B40, sepanjang 2026	15,646,372	13,612,344	2,129,725	219,198
B50, dimulai April 2026	18,580,067	16,164,658	2,529,049	260,298

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan neraca massa biodiesel (LPEM FEB UI, 2020)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa peningkatan mandatori dari B40 ke B50 tidak hanya meningkatkan kebutuhan CPO secara signifikan, tetapi juga mendorong lonjakan kebutuhan methanol dan katalis masing-masing sekitar 18–19%. Hal ini menegaskan bahwa ketergantungan terhadap input non-CPO bukan bersifat marginal, melainkan struktural dalam sistem produksi biodiesel.

Dalam praktik industri, ketergantungan tersebut hingga saat ini masih didominasi oleh pasokan impor. Methanol sebagian besar dipasok oleh industri petrokimia global berbasis gas, sementara katalis *sodium methylate* (SMO) diproduksi oleh perusahaan kimia multinasional seperti BASF dan Evonik di Eropa, serta oleh produsen di China dan kawasan Timur Tengah. Studi akademik menunjukkan bahwa industri biodiesel Indonesia masih mengimpor hampir seluruh kebutuhan sodium methylate, dengan volume mencapai lebih dari 140 ribu ton per tahun, sehingga meningkatkan eksposur terhadap risiko fluktuasi harga dan gangguan pasokan global (Rosida et al., 2025).

Lebih jauh, laporan industri juga mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan katalis biodiesel Indonesia dipasok dari kawasan Timur Tengah, khususnya melalui hub petrokimia di Al Jubail, Arab Saudi. Ketergantungan ini secara langsung mengaitkan keberlanjutan produksi biodiesel domestik dengan stabilitas jalur distribusi strategis, terutama Selat Hormuz—yang saat ini menjadi salah satu titik krusial dalam dinamika geopolitik global (OPIS, 2026).

Dengan demikian, ketergantungan Indonesia tidak hanya bersifat geografis, tetapi juga struktural. Secara geografis, rantai pasok biodiesel terhubung dengan kawasan yang rentan konflik. Secara struktural, belum terdapat alternatif katalis yang dapat menggantikan sodium methylate secara ekonomis dan teknis pada skala industri (Rosida et al., 2025). Diversifikasi pasokan dari Eropa maupun China tidak menghilangkan ketergantungan, melainkan hanya menggeser sumber risiko dalam sistem global yang sama.

Dalam perspektif sistem industri, kondisi ini menciptakan suatu paradoks kebijakan. Di satu sisi, biodiesel diposisikan sebagai instrumen untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi fosil. Namun di sisi lain, ekspansi biodiesel justru berpotensi meningkatkan ketergantungan terhadap impor bahan baku industri, khususnya methanol dan katalis.

Selain itu, struktur industri nasional juga menunjukkan adanya gap integrasi antara sektor kelapa sawit dan industri petrokimia. Ketersediaan CPO yang kuat di sisi hulu belum diimbangi oleh penguasaan industri kimia di sisi tengah (midstream), sehingga rantai nilai biodiesel belum sepenuhnya terintegrasi secara domestik. Dalam kondisi ini, ketahanan energi berbasis biodiesel menjadi sangat bergantung pada stabilitas sistem global yang berada di luar kendali nasional.

Temuan ini sejalan dengan kajian strategis yang menekankan bahwa keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan kepemimpinan pasar biodiesel tidak cukup hanya ditopang oleh keunggulan sumber daya, tetapi juga memerlukan penguatan struktur industri dan integrasi rantai nilai secara menyeluruh. Rosida et al. (2025) menunjukkan bahwa pendekatan *Analyze–Formulate–Implement* dalam pengembangan biodiesel menempatkan aspek industrialisasi dan penguatan sektor pendukung—termasuk industri kimia—sebagai faktor kunci dalam membangun daya saing dan keberlanjutan industri biodiesel nasional. Dengan demikian, dalam konteks ketidakpastian geopolitik global yang semakin kompleks, tantangan utama program biodiesel tidak lagi terletak pada ketersediaan bahan baku utama, melainkan pada penguasaan sistem produksi secara utuh.

Ke depan, penguatan program biodiesel perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan konsumsi melalui mandatori *blending*, tetapi juga pada pembangunan kapasitas industri pendukung secara terintegrasi. Pengembangan industri methanol domestik, investasi pada produksi katalis, serta integrasi antara sektor energi dan petrokimia menjadi prasyarat untuk memastikan bahwa biodiesel tidak hanya menjadi instrumen substitusi energi, tetapi juga bagian dari strategi kedaulatan industri nasional.

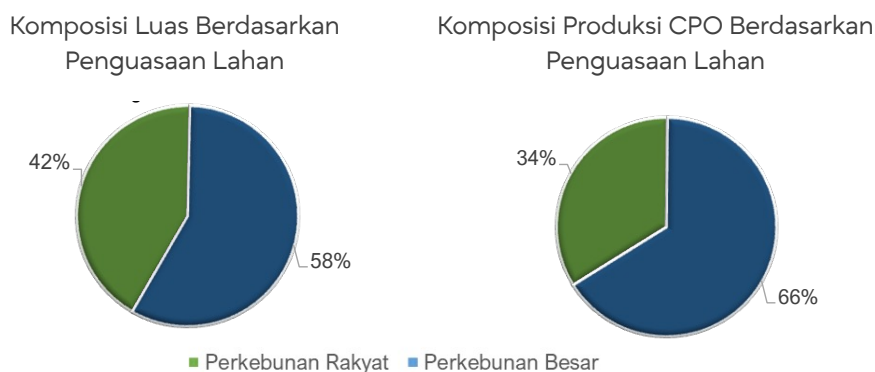
Tanpa langkah tersebut, percepatan menuju B50 berisiko tidak hanya memperbesar konsumsi energi domestik, tetapi juga memperluas eksposur terhadap risiko global yang semakin kompleks.



BAB 7. OUTLOOK PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR)

7.1 Posisi Strategis PSR dalam Keberlanjutan Industri Sawit

Dalam konteks dinamika industri sawit pada Q2 2026, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) perlu ditempatkan bukan sekadar sebagai program teknis di tingkat hulu, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menjaga keberlanjutan pasokan nasional dalam jangka menengah. Di tengah meningkatnya tekanan terhadap minyak sawit dari sisi energi, ekspor, dan kebutuhan domestik, kemampuan Indonesia mempertahankan produktivitas sawit—terutama pada segmen perkebunan rakyat—menjadi faktor yang semakin menentukan. Hal ini penting mengingat data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa luas perkebunan sawit rakyat saat ini telah mencapai sekitar 42% dari total luas perkebunan sawit nasional. Dengan porsi yang besar tersebut, dinamika produktivitas kebun rakyat akan sangat memengaruhi kapasitas produksi nasional secara keseluruhan.



Gambar 19. Perbandingan Komposisi Luas dan Produksi CPO Perkebunan Rakyat vs Perkebunan Besar

Sumber: Ditjenbun (2025) diolah

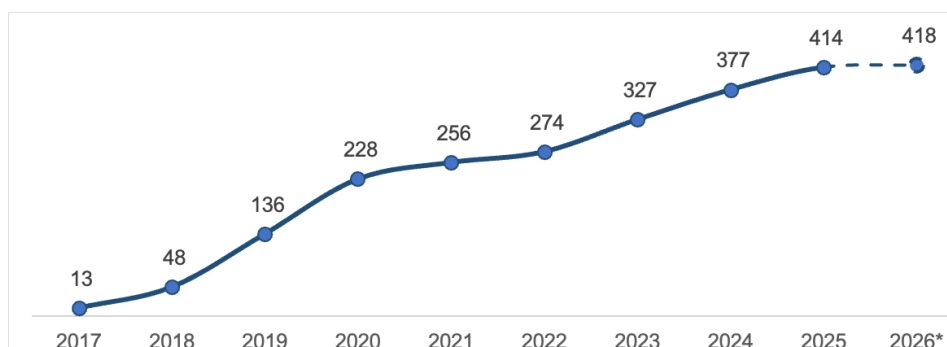
Posisi strategis tersebut semakin terlihat apabila dibandingkan antara komposisi penguasaan lahan dan kontribusi produksi CPO. Gambar 19 menunjukkan bahwa meskipun perkebunan rakyat menguasai sekitar 42% luas areal sawit nasional, kontribusinya terhadap produksi CPO baru mencapai sekitar 34%. Sebaliknya, perkebunan besar yang menguasai sekitar 58% lahan justru menyumbang sekitar 66% produksi CPO. Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan utama pada segmen sawit rakyat bukan semata luas areal, melainkan juga tingkat produktivitas yang masih relatif tertinggal dibandingkan perkebunan besar. Dalam konteks tersebut, PSR menjadi penting bukan hanya sebagai instrumen peremajaan tanaman tua, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkecil kesenjangan produktivitas antarsegmen usaha perkebunan.

Dengan demikian, dalam konteks outlook ini, perkembangan PSR perlu dibaca sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi struktural produksi sawit nasional. Semakin besar keberhasilan PSR dalam meningkatkan produktivitas kebun rakyat, semakin kuat pula kemampuan industri sawit Indonesia menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik, ekspor, dan ketahanan pasok jangka menengah.

7.2 Kinerja Program PSR secara Nasional

Secara umum, kinerja Program PSR dalam periode 2017 hingga Februari 2026 menunjukkan tren peningkatan yang cukup kuat dalam jangka panjang, meskipun laju pencapaiannya tidak selalu seragam pada setiap periode. Secara kumulatif, realisasi rekomendasi teknis (rekomtek) PSR telah mencapai sekitar **418 ribu hektare** dengan melibatkan sekitar 188.618 pekebun (Gambar 20). Capaian tersebut menunjukkan bahwa dalam kurang dari satu dekade, luas kebun sawit rakyat yang telah diremajakan telah mencapai lebih dari **6%** dari total area sawit rakyat nasional. Walaupun angka ini masih belum memenuhi kebutuhan peremajaan secara keseluruhan, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa

PSR telah tumbuh menjadi salah satu instrumen intervensi produktivitas yang semakin penting dalam tata kelola perkebunan sawit nasional.



Gambar 20. Akumulasi Kinerja Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Tahun 2017 s.d Februari 2026 (ribu hektare)

Sumber: Kementerian Pertanian (2026) diolah

Gambar 20 juga memperlihatkan bahwa akselerasi program berlangsung cukup nyata terutama setelah tahun 2018. Realisasi kumulatif meningkat dari sekitar **13 ribu hektare pada 2017** menjadi **48 ribu hektare pada 2018**, lalu melonjak ke **136 ribu hektare pada 2019** dan **228 ribu hektare pada 2020**, sebelum terus bertambah hingga sekitar **418 ribu hektare** pada Februari 2026. Pola ini menunjukkan bahwa pada fase awal PSR terjadi pertumbuhan capaian yang relatif cepat, tetapi pada fase berikutnya tantangan program semakin bergeser pada upaya menjaga konsistensi percepatan implementasi di lapangan.

Namun demikian, apabila merujuk pada simulasi dalam *Outlook Industri Sawit Indonesia 2026*, capaian tersebut tetap perlu ditinjau kembali dari sisi progres percepatannya. Simulasi tersebut mengingatkan bahwa apabila PSR berjalan lambat, dengan laju peremajaan hanya berada pada kisaran **30–50 ribu hektare per tahun**, maka tambahan areal yang diremajakan tidak akan cukup untuk mengimbangi pertumbuhan tanaman tua dan tidak produktif. Dalam skenario seperti itu, produksi CPO perkebunan rakyat justru berisiko terus menurun dalam jangka menengah dan panjang, bahkan dapat turun menuju sekitar **10 juta ton pada 2060** dari kisaran sekitar **17 juta ton pada 2025**. Dengan kata lain, tren peningkatan capaian PSR saat ini memang positif, tetapi belum cukup apabila tidak diikuti oleh percepatan yang lebih progresif.

Dalam perspektif penguatan sisi pasokan, kebutuhan percepatan tersebut menjadi semakin penting mengingat industri sawit Indonesia ke depan harus menopang permintaan domestik yang terus meningkat, sekaligus menjaga ruang ekspor dan stabilitas pasokan. Karena itu, peremajaan sawit rakyat idealnya tidak berhenti pada capaian administratif yang terus bertambah, tetapi perlu diarahkan pada skala implementasi yang lebih memadai, yakni sekitar **3% per tahun** atau setara sekitar **180–200 ribu hektare**. Percepatan tersebut tidak hanya berarti mengganti tanaman tua yang minim perawatan dan berproduksi rendah dengan tanaman baru yang menggunakan benih unggul dan dikelola berdasarkan prinsip *best management practice* (BMP), tetapi juga sekaligus memperbaiki tata kelola di tingkat hulu, termasuk aspek legalitas lahan agar kebun rakyat yang diremajakan semakin *clear and clean*, bebas dari kawasan hutan maupun tumpang tindih dengan lahan konsesi Hak Guna Usaha (HGU).

Karena itu, kinerja PSR pada periode sekarang perlu dibaca bukan hanya sebagai indikator bahwa program terus berjalan, melainkan sebagai dasar untuk menilai apakah laju peremajaan yang ada sudah cukup memadai untuk benar-benar menopang keberlanjutan produksi sawit rakyat dan memperkuat fondasi pasokan nasional di masa depan. **Dalam konteks outlook ini, pesan utamanya jelas: tanpa percepatan PSR yang lebih kuat, risiko pelemahan produktivitas kebun rakyat akan tetap menjadi salah satu titik lemah struktural industri sawit Indonesia.**

7.3 Sebaran Wilayah dan Disparitas Implementasi PSR

Dari sisi implementasi, capaian Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menunjukkan sebaran yang tidak merata antarprovinsi. Gambar 21 memperlihatkan bahwa kontribusi terbesar hingga tahun 2026 masih berasal dari **Aceh** dengan total realisasi sekitar **76.857 hektare**, disusul oleh **Sumatera Selatan** sekitar **75.017 hektare**, **Riau** sekitar **49.874 hektare**, **Jambi** sekitar **40.309 hektare**, dan **Sumatera Utara** sekitar **36.064 hektare**. Sementara itu, sejumlah provinsi lain di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua menunjukkan capaian yang relatif lebih rendah. Pola ini menunjukkan bahwa kemajuan PSR belum berlangsung merata secara nasional, melainkan masih sangat dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing wilayah.



Gambar 21. Total Realisasi PSR Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2026

Sumber: Kementerian Pertanian (2026) diolah

Salah satu faktor yang dapat menjelaskan disparitas tersebut adalah perbedaan sejarah perkembangan perkebunan sawit antardaerah. Sentra-sentra sawit yang lebih dahulu berkembang di Sumatera memiliki struktur umur tanaman yang relatif lebih tua dibanding wilayah ekspansi yang berkembang belakangan di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dalam konteks ini, kebutuhan PSR antarprovinsi memang tidak dapat diasumsikan sama, karena tekanan peremajaan sangat bergantung pada akumulasi umur tanaman, kualitas bahan tanam, dan dinamika ekspansi kebun pada masa lalu. Dengan demikian, peta realisasi PSR pada dasarnya juga merefleksikan perbedaan kebutuhan peremajaan yang terbentuk secara historis.

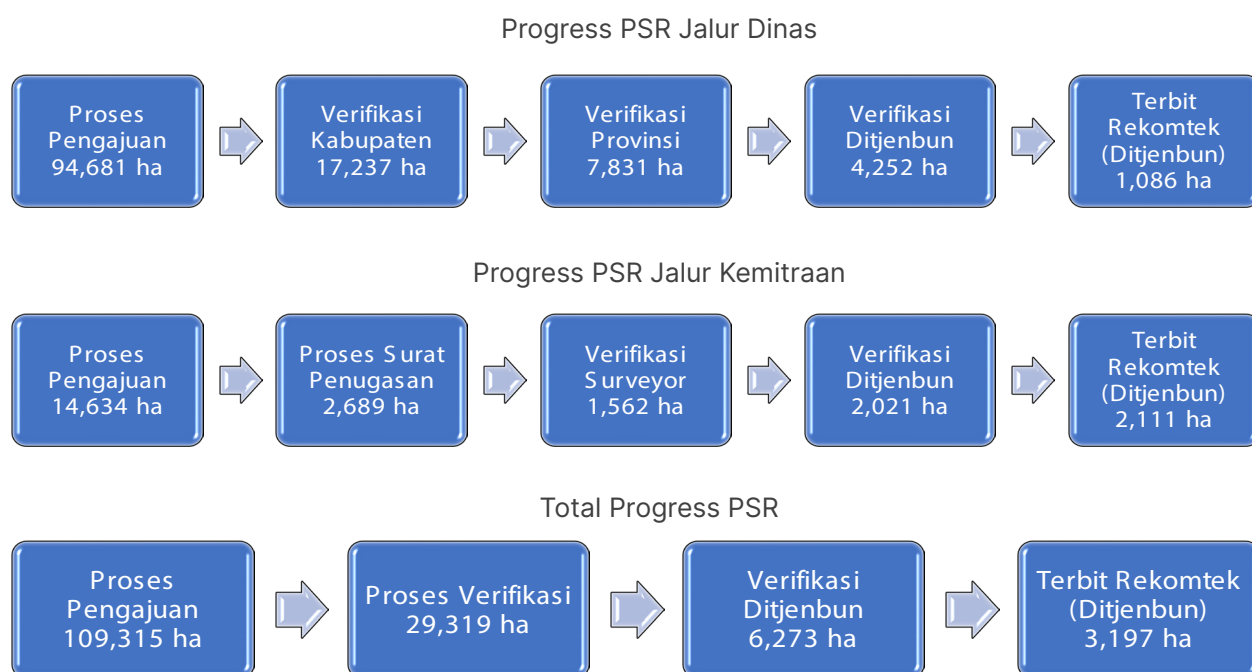
Namun demikian, pola capaian antarprovinsi juga menunjukkan bahwa kebutuhan besar tidak selalu otomatis diikuti realisasi PSR yang tinggi. Pada beberapa provinsi dengan sejarah sawit yang relatif tua seperti **Sumatera Utara** dan **Riau**, capaian PSR justru belum setinggi yang mungkin diharapkan jika dibandingkan dengan besarnya peran kedua wilayah tersebut dalam sejarah industri sawit nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tantangan implementasi pada kedua provinsi sentra tersebut bukan hanya soal kebutuhan peremajaan, tetapi juga berkaitan dengan kompleksitas legalitas lahan, fragmentasi penguasaan kebun rakyat, kesiapan kelembagaan pekebun, serta efektivitas proses verifikasi dan pendampingan. Dengan kata lain, wilayah yang paling matang secara historis belum tentu menjadi wilayah yang paling mudah diremajakan.

Sebaliknya, capaian yang relatif tinggi di provinsi seperti Aceh menunjukkan bahwa keberhasilan PSR juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas implementasi di tingkat daerah. Karena itu, peta realisasi PSR tidak cukup dibaca semata-mata sebagai peta kebutuhan, tetapi juga sebagai peta kesiapan kelembagaan dan efektivitas eksekusi program. Dalam perspektif ini, disparitas implementasi PSR menjadi pengingat bahwa pendekatan kebijakan tidak dapat diseragamkan secara nasional. Provinsi dengan hambatan legalitas dan kelembagaan yang berat memerlukan strategi percepatan yang berbeda dibanding wilayah yang hambatan utamanya lebih bersifat teknis atau administratif. Oleh karena itu, penguatan PSR ke depan perlu semakin diarahkan pada pendekatan yang lebih spesifik wilayah agar percepatan program dapat berlangsung lebih merata dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, disparitas capaian PSR antardaerah menjadi sinyal bahwa percepatan program ke depan memerlukan desain kebijakan yang lebih berbasis wilayah, sehingga intervensi tidak hanya menambah target nasional, tetapi juga benar-benar menjawab hambatan implementasi yang berbeda di setiap provinsi.

7.4 Perkembangan PSR pada Semester I 2026

Memasuki tahun 2026, Kementerian Pertanian menetapkan target Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebesar **120.000 hektare**, dengan target khusus Semester I sebesar **50.000 hektare**. Hingga Februari 2026, capaian yang telah sampai pada tahap terbit rekomendasi teknis (rekomtek) masih relatif terbatas, yaitu sekitar 3.197 hektare, di mana 1.086 hektare dari jalur dinas dan 2.111 hektare dari jalur kemitraan. Walaupun terkesan capaian pada awal tahun ini cenderung rendah, namun sebenarnya ini adalah hasil akumulasi proses yang panjang dari awal proses pengusulan.



Gambar 22. Progress Perkembangan PSR s.d Februari 2026

Sumber: Kementerian Pertanian (2026) diolah

Gambar 22 menjelaskan data status progress PSR hingga Februari 2026, di mana menunjukkan bahwa **pipeline** usulan PSR **sebenarnya sudah cukup besar**, baik melalui **jalur dinas** maupun **jalur kemitraan**.

Melalui jalur dinas, luas usulan pada tahap proses pengajuan di bulan Februari 2026 telah mencapai sekitar **94.681 hektare**. Namun dari jumlah tersebut, yang telah masuk ke tahap **verifikasi kabupaten** baru sekitar **17.237 hektare**, berlanjut ke **verifikasi provinsi** sekitar **7.831 hektare**, lalu ke tahap **verifikasi Ditjenbun** sekitar **4.252 hektare**, sebelum akhirnya yang benar-benar **terbit rekomtek** baru sekitar **1.086 hektare**.

Sementara itu, melalui jalur kemitraan, luas usulan yang masuk mencapai sekitar **14.634 hektare**, dengan progres **2.689 hektare** pada tahap proses surat penugasan, **1.562 hektare** pada tahap verifikasi surveyor, **2.021 hektare** pada tahap verifikasi Ditjenbun, dan sekitar **2.111 hektare** yang telah sampai pada tahap terbit rekomtek.

Secara total, luas usulan PSR yang telah masuk hingga Februari 2026 mencapai sekitar **109.315 hektare**. Namun, dari jumlah tersebut, yang sudah berada pada tahap **proses verifikasi** baru sekitar **29.319 hektare**, yang telah masuk **verifikasi Ditjenbun** sekitar **6.273 hektare**, dan yang telah benar-benar **terbit rekomtek** baru sekitar **3.197 hektare**.

Pola ini menunjukkan bahwa tantangan utama PSR pada Semester I 2026 bukan terletak pada rendahnya volume usulan, melainkan pada panjangnya tahapan verifikasi dan validasi sebelum usulan dapat dikonversi menjadi realisasi program.

Dalam praktiknya, capaian PSR sangat ditentukan oleh efektivitas rantai verifikasi dari pengajuan hingga penerbitan rekomtek. Karena proses tersebut bersifat berlapis, bottleneck pada satu tahapan akan langsung menurunkan kecepatan konversi keseluruhan. Secara umum, sumber perlambatan berasal dari kualitas data administrasi usulan, status legalitas lahan, mismatch data *on-desk* dan kondisi faktual lapangan, kapasitas verifikasi yang terbatas, serta koordinasi lintas level yang belum sepenuhnya sinkron. Dalam konteks ini, perbaikan kualitas usulan sejak awal dan penguatan sistem verifikasi merupakan titik ungu utama untuk meningkatkan efektivitas implementasi PSR (Prayuningsih et al., 2024). banks are faced with the risk of bad debts, where the borrower is unable or unwilling to repay the loan that has been granted. This risk can be caused by economic factors such as slowing growth, market instability, or a financial crisis. In addition, internal factors such as imprudent credit policies, poor risk management, or the bank's inability to conduct effective monitoring can also contribute to bad debt risk. This study aims to analyze the effect of capital adequacy ratio, return on assets, loan-to-deposit ratio and operating expenses on non-performing loans in conventional banks. The type of research used is quantitative with a cross-sectional approach. The number of conventional banks sampled was 20, with an observation period of 2021–2022, using quarterly data. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis using three alternative regression models, namely the common effect model (CEM, (Manurung et al., 2022).

Dengan demikian, perkembangan PSR pada Semester I 2026 lebih tepat dipahami sebagai persoalan **konversi pipeline menjadi realisasi**, bukan semata persoalan kurangnya permintaan program. Artinya, evaluasi terhadap capaian awal tahun tidak cukup hanya melihat luas rekomtek yang telah terbit, tetapi juga perlu membaca **besarnya usulan yang masih tertahan dalam berbagai tahapan proses**. Dalam konteks ini, percepatan PSR ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan memperlancar rantai verifikasi, memperkuat pendampingan administrasi dan legalitas di tingkat pekebun, serta meningkatkan efektivitas koordinasi antara pemerintah daerah, kelembagaan pekebun, dan pemerintah pusat.

7.5 Outlook Capaian PSR Q2 2026 dan Strategi untuk Mencapainya

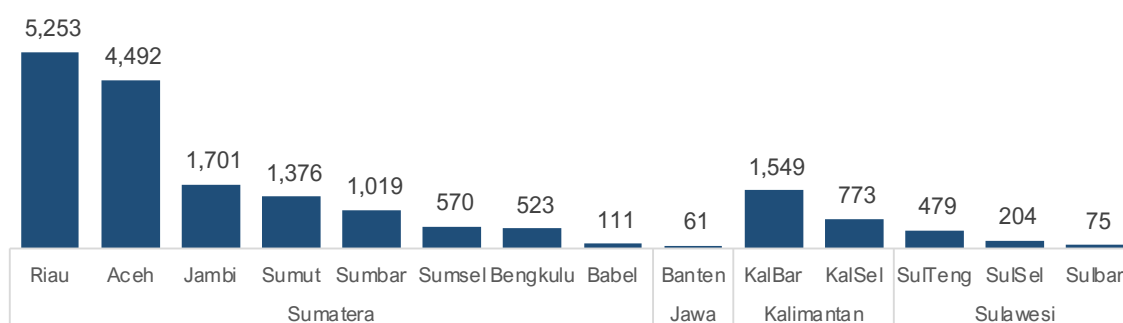
7.5.1 Outlook Capaian PSR Q2 2026

Berdasarkan perkembangan status usulan hingga Februari 2026, terdapat indikasi bahwa ruang peningkatan capaian Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada akhir Q2 2026 masih cukup terbuka apabila proses verifikasi dapat dipercepat. Dengan mempertimbangkan besarnya usulan yang sudah masuk dan sedang berproses, baik melalui jalur dinas maupun jalur kemitraan, potensi capaian rekomendasi teknis (rekomtek) pada akhir Q2 2026 diperkirakan dapat mencapai kisaran **18–20 ribu hektare**. Angka ini memang masih jauh dari target Semester I sebesar **50 ribu hektare**, sehingga mengindikasikan bahwa dengan kapasitas aktual sistem saat ini, capaian yang mungkin diraih baru berada pada kisaran **36–40%** dari target semesteran. Meski demikian, potensi tersebut tetap menunjukkan adanya ruang peningkatan yang cukup berarti dibanding capaian awal tahun, sepanjang *bottleneck* verifikasi dapat diurai secara lebih efektif.

Potensi tersebut pada dasarnya ditopang oleh besarnya *pipeline* usulan yang sudah tersedia. Hingga Februari 2026, usulan yang masuk telah mencapai lebih dari **109 ribu hektare**, tetapi sebagian besar masih tertahan pada berbagai tahapan verifikasi. Dalam kondisi ini, tantangan utama PSR bukan lagi

terletak pada rendahnya permintaan program, melainkan pada kemampuan sistem untuk mengonversi usulan yang telah masuk menjadi rekomtek. Oleh karena itu, pembacaan terhadap outlook PSR pada Q2 2026 perlu menempatkan kapasitas verifikasi sebagai faktor kunci yang menentukan seberapa jauh percepatan program dapat diwujudkan dalam jangka pendek.

Secara spasial, Gambar 23 menunjukkan bahwa potensi capaian Q2 2026 juga terkonsentrasi pada beberapa wilayah tertentu. Riau memiliki total potensi sekitar **5.253 hektare**, disusul Aceh **4.492 hektare**, Jambi **1.701 hektare**, Kalimantan Barat **1.549 hektare**, Sumatera Utara **1.376 hektare**, dan Sumatera Barat **1.019 hektare**. Di bawahnya terdapat Kalimantan Selatan **773 hektare**, Sumatera Selatan **570 hektare**, Bengkulu **523 hektare**, Sulawesi Tengah **479 hektare**, Sulawesi Selatan **204 hektare**, Bangka Belitung **111 hektare**, Sulawesi Barat **75 hektare**, dan Banten **61 hektare** (Kementerian Pertanian, 2026). Sebaran ini menunjukkan bahwa ruang percepatan PSR pada Q2 2026 tidak merata antarwilayah, sehingga strategi pencapaiannya perlu mempertimbangkan prioritas pada daerah dengan *pipeline* terbesar sekaligus kapasitas implementasi yang relatif lebih siap.



Gambar 23. Outlook PSR Per Provinsi Q2 2026

Sumber: Kementerian Pertanian (2026) diolah

7.5.2 Strategi PSR Q2 2026

Strategi untuk mendorong capaian **18–20 ribu hektare** pada akhir Q2 2026 perlu diarahkan terutama pada perluasan ruang verifikasi, tanpa mengabaikan prinsip tata kelola PSR yang berlaku. Hal ini menuntut adanya dorongan kebijakan dan perhatian yang lebih kuat dari pemerintah pusat maupun daerah agar tahapan verifikasi dapat diselesaikan lebih cepat, namun tetap akurat dan akuntabel. Dalam konteks ini, percepatan tidak cukup dipahami sebagai penambahan target semata, melainkan sebagai penguatan kapasitas sistem untuk memproses usulan yang sudah tersedia.

Secara operasional, strategi yang paling mendesak adalah mempercepat tahapan verifikasi di tingkat kabupaten dan provinsi untuk jalur dinas, serta pada tingkat surveyor untuk jalur kemitraan. Selain itu, perlu ada penajaman prioritas terhadap provinsi dengan potensi usulan terbesar agar tambahan sumber daya verifikasi dapat diarahkan secara lebih fokus. Pendekatan ini penting karena dalam situasi kapasitas yang terbatas, efisiensi pencapaian target jangka pendek akan sangat ditentukan oleh kemampuan memusatkan upaya pada titik-titik backlog yang paling besar.

Di samping percepatan verifikasi, strategi lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas usulan sejak tahap awal. Semakin baik kualitas dokumen pengajuan dan semakin sinkron data administratif dengan kondisi lapangan, maka semakin kecil kemungkinan usulan tertahan berulang kali pada proses pemeriksaan. Oleh karena itu, pencapaian PSR pada Q2 2026 pada akhirnya sangat bergantung pada kombinasi antara kapasitas verifikasi yang lebih besar, pendampingan administrasi yang lebih intensif, dan koordinasi yang lebih solid antara pelaku di tingkat lapangan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Dengan prasyarat tersebut, potensi capaian **18–20 ribu hektare** menjadi lebih realistis untuk dikejar, meskipun masih belum cukup untuk memenuhi target semesteran secara penuh.

7.6 Implikasi Strategis PSR terhadap Outlook Sawit Indonesia

Apabila hingga akhir Semester I 2026 capaian PSR hanya berada pada kisaran **18–20 ribu hektare**, maka implikasi strategisnya perlu dibaca bukan sekadar sebagai selisih terhadap target semesteran, tetapi sebagai cerminan kapasitas aktual sistem implementasi PSR saat ini. Dalam konteks tersebut, beberapa implikasi utama yang perlu dicermati adalah sebagai berikut:

1. Beban pencapaian pada Semester II akan semakin besar

Capaian Semester I yang masih berada pada kisaran 18–20 ribu hektare berarti sisa target tahunan yang harus dikejar pada Semester II akan menjadi semakin besar. Kondisi ini meningkatkan tekanan terhadap kapasitas pelaksanaan program pada paruh kedua tahun. Tanpa perbaikan pada mekanisme *pipeline* sejak Semester I, backlog berpotensi terus berulang dan membuat target tahunan PSR semakin sulit dicapai secara optimal. Dalam konteks ini, persoalan utama PSR bukan terletak pada rendahnya minat atau usulan, melainkan pada belum cukup kuatnya sistem konversi dari pengajuan menuju rekomtek dan realisasi.

2. Perbaikan *pipeline* dan pendampingan lapangan menjadi agenda mendesak

Perbaikan *pipeline* perlu ditempatkan sebagai agenda strategis utama. Salah satu langkah penting adalah penambahan tenaga pendampingan di lapangan, khususnya untuk membantu kelompok tani menyiapkan dokumen usulan yang lebih berkualitas. Pendampingan ini krusial karena kualitas data pada tahap awal sangat menentukan cepat atau lambatnya proses verifikasi berikutnya. Jika dokumen yang diajukan sejak awal sudah lebih sinkron dengan persyaratan yang ditetapkan, maka tahapan verifikasi di tingkat kabupaten, provinsi, maupun Ditjenbun dapat berjalan lebih lancar, sehingga rasio konversi dari usulan menuju rekomtek juga meningkat.

3. Dukungan lintas kementerian/lembaga menjadi sangat menentukan

Hambatan implementasi PSR tidak seluruhnya dapat diselesaikan oleh sektor perkebunan semata. Salah satu kendala yang selama ini cukup menyulitkan di tingkat kelompok tani adalah proses penerbitan surat keterangan bahwa lahan yang diusulkan bebas dari kawasan hutan dan tidak berada di atas lahan konsesi HGU. Karena itu, dukungan dari kementerian/lembaga yang membidangi kawasan hutan dan pertanahan menjadi sangat penting. Jika dukungan ini diperkuat, maka proses penerbitan dokumen dapat berjalan lebih cepat, lebih terarah, dan dapat mengurangi waktu tunggu administrasi yang selama ini menjadi salah satu sumber keterlambatan.

4. Penguatan tata kelola digital harus menjadi titik unkit percepatan

Merespons tantangan tersebut, arah kebijakan PSR tahun 2026 perlu difokuskan pada penguatan tata kelola berbasis digital dan integrasi sistem. Implementasi **PSR Online V2** yang terintegrasi dengan data **BPN** dan sistem **SIGAP** merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akurasi data, mempercepat validasi, dan membantu penyelesaian isu legalitas lahan (Kementerian Pertanian, 2026). Pada saat yang sama, penguatan SDM pendamping, pengembangan sistem monitoring berbasis *real-time*, serta koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar pengendalian program berjalan lebih efektif. Optimalisasi anggaran juga sebaiknya diarahkan pada wilayah dengan tingkat kesiapan tinggi untuk menghasilkan *quick wins* yang dapat mendorong akselerasi nasional secara lebih nyata. Perbaikan pada Semester I 2026 dengan demikian perlu diperlakukan sebagai **milestone pembenahan PSR**, bukan sekadar respons jangka pendek untuk mengejar target semesteran, tetapi sebagai dasar untuk memperbaiki tata kelola PSR secara lebih permanen dalam koridor *governance* yang tetap akuntabel (Kementerian Pertanian, 2026).

5. Dampaknya langsung terkait dengan kekuatan struktural industri sawit

Dalam perspektif industri sawit yang lebih luas, keberhasilan memperbaiki mekanisme PSR akan memberi dampak langsung terhadap kekuatan struktural pasokan nasional. Di tengah meningkatnya tekanan permintaan dari sektor biodiesel, kebutuhan menjaga ekspor, dan pentingnya stabilitas pasar domestik, PSR merupakan salah satu instrumen utama untuk memastikan bahwa kebun rakyat tidak terus tertinggal dalam produktivitas. Oleh karena itu, capaian **18–20 ribu hektare** pada Semester I 2026 perlu dibaca bukan hanya sebagai angka realisasi, tetapi sebagai indikator awal apakah sistem PSR sedang bergerak menuju percepatan yang lebih sehat. Jika pembenahan *pipeline*, pendampingan, integrasi sistem, dan dukungan lintas kelembagaan benar-benar diperkuat, maka PSR dapat berkembang dari sekadar program peremajaan menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan industri sawit Indonesia ke depan.



BAB 8. PENUTUP

Outlook Sawit Q2 2026 menunjukkan bahwa industri kelapa sawit Indonesia memasuki fase yang semakin dipengaruhi oleh interaksi erat antara faktor fundamental domestik dan tekanan eksternal global. Pada satu sisi, sawit masih ditopang oleh peran strategisnya dalam ekspor, industri pangan, dan ketahanan energi nasional. Namun pada sisi lain, ruang gerak industri pada Q2 2026 menjadi semakin sempit karena pasar berada dalam kondisi yang cenderung lebih ketat, sementara sumber tekanan datang secara bersamaan dari sisi produksi, iklim, harga energi, kebijakan, dan geopolitik.

Dari sisi pasar, produksi nasional masih relatif terjaga, tetapi tidak sepenuhnya longgar. Pemulihan pascabanjir di sejumlah sentra produksi belum sepenuhnya selesai, sementara transisi menuju musim kering mulai menambah tekanan baru terhadap prospek pasokan. Pada saat yang sama, konsumsi domestik tetap kuat dengan biodiesel sebagai penopang utama, sehingga ruang stok menjadi semakin penting sebagai buffer pasar. Dalam konteks ini, keseimbangan supply-demand pada semester pertama 2026 menunjukkan bahwa fleksibilitas pasar sawit nasional cenderung lebih terbatas dibandingkan periode sebelumnya.

Dinamika tersebut diperkuat oleh perkembangan harga CPO yang semakin sensitif terhadap pergerakan energi dan ketidakpastian geopolitik. Kenaikan harga minyak mentah global tidak hanya memengaruhi ekspektasi pasar minyak nabati, tetapi juga meningkatkan biaya logistik, premi risiko, dan tekanan terhadap kebijakan domestik. Konsekuensinya, instrumen seperti Harga Referensi, Pungutan Ekspor, dan Bea Keluar menjadi semakin penting untuk dibaca bukan hanya sebagai instrumen fiskal, melainkan juga sebagai mekanisme yang memengaruhi transmisi harga, daya saing ekspor, posisi petani, dan stabilitas pasar domestik.

Dalam dimensi yang lebih luas, perkembangan Q2 2026 juga menegaskan bahwa sawit Indonesia kini semakin terhubung dengan sistem perdagangan dan energi global. Peluang pasar tetap terbuka, termasuk dari perubahan konfigurasi perdagangan internasional, tetapi realisasi peluang tersebut tidak bersifat otomatis. Daya saing harga, kesiapan hilirisasi, kondisi pasokan domestik, serta ketahanan rantai pasok industri tetap akan menjadi faktor penentu. Karena itu, respons kebijakan perlu menjaga keseimbangan antara dorongan pemanfaatan domestik, kepentingan ekspor, dan stabilitas pasar dalam negeri.

Outlook ini juga memperlihatkan bahwa tantangan jangka pendek tidak dapat dipisahkan dari persoalan struktural jangka menengah. Perkembangan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi pengingat bahwa keberlanjutan industri tidak cukup ditopang oleh manajemen pasar dan kebijakan hilir semata. Tanpa percepatan perbaikan produktivitas kebun rakyat, kapasitas pasok nasional dalam beberapa tahun ke depan akan menghadapi keterbatasan yang semakin nyata, terutama ketika permintaan domestik dan global terus meningkat.

Dengan demikian, arah industri sawit Indonesia pada Q2 2026 perlu dibaca secara hati-hati. Periode ini bukan hanya fase penyesuaian jangka pendek, tetapi juga fase yang memperlihatkan dengan lebih jelas titik temu antara risiko pasar, tekanan iklim, dinamika energi, kebijakan fiskal, dan tantangan struktural industri. Oleh karena itu, penguatan respons kebijakan ke depan perlu diarahkan pada tiga hal utama: menjaga fleksibilitas neraca pasar jangka pendek, memperkuat kesiapan industri dalam menghadapi volatilitas energi dan geopolitik, serta mempercepat fondasi produktivitas jangka menengah melalui pembenahan sektor hulu, terutama PSR.

Pada akhirnya, ketahanan industri sawit Indonesia tidak hanya akan ditentukan oleh kemampuan merespons gejolak harga sesaat, tetapi oleh kemampuan membangun keseimbangan antara kepentingan ekspor, ketahanan energi, stabilitas domestik, dan keberlanjutan pasokan jangka panjang. Dalam konteks itulah Outlook Sawit Q2 2026 diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membaca arah industri serta menyiapkan respons yang lebih adaptif, terukur, dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- BMKG. (2026a). *Pemanfaatan Informasi Prakiraan Musim dan Antisipasi Dampak Musim Kemarau 2026*. V, 3.
- BMKG. (2026b). *Prediksi Musim Kemarau Tahun 2026 di Indonesia*.
- BPS. (2025a). *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Maret 2025*. BPS. <https://web-api.bps.go.id/download>.
- BPS. (2025b). *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Maret 2025*. BPS.
- BPS. (2025c). *Statistik Tanaman Perkebunan Tahunan Indonesia 2025* (Vol. 1). <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/29/8d2a6ab3510f9828daf73191/statistik-tanaman-perkebunan-tahunan-indonesia-2024--kelapa-sawit--kopi--kakao--karet--teh--dan-komoditas-perkebunan-unggulan-.html>
- BPS. (2025d). *Statistik Tanaman Perkebunan Tahunan Indonesia 2025* (Vol. 1).
- BPS. (2026a). *BPS Exim*. <https://www.bps.go.id/id/exim>
- BPS. (2026b). *BPS Exim*.
- Corley, R. H. V., & Tinker, P. B. (2016). The oil palm. In *Oil Crops: Growth, Uses, and Toxicity*. <https://doi.org/10.1017/cbo9781316530122.010>
- Ditjenbun. (2025). *Buku Statistik Perkebunan 2024-2026 Jilid I*. <https://ditjenbun.pertanian.go.id/?publikasi=buku-statistik-perkebunan-2024-2026-jilid-i>
- Elaeis. (2026). *Konflik Timur Tengah Tekan Ekspor Sawit, Indonesia Pilih Rute Alternatif Lewat Tanjung Harapan*. <https://www.elaeis.co/berita/baca/konflik-timur-tengah-tekan-ekspor-sawit-indonesia-pilih-rute-alternatif-lewat-tanjung-harapan>
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). (2026). *Posisi Harga Komoditas pada Penutupan Bursa & Pasar Fisik*. <https://gapki.id/news/2026/>
- Investing.com. (2026). *Data Historis Minyak Brent Berjangka*. <https://id.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data>
- ITC. (2026). *Trademap*. <https://www.trademap.org/>
- Kementerian ESDM. (2026). *HIP BBN Jenis Biodiesel Bulan Maret 2026*. <https://ebtke.esdm.go.id/artikel/pengumuman/hip-bbn-jenis-biodiesel-bulan-maret-2026>
- Kementerian Pertanian. (2026). *Data Kementerian Pertanian*.
- Keputusan Menteri ESDM RI, Pub. L. No. 439.K/EK.01/MEM.E/2025 (2025).
- LPEM FEB UI. (2020). *Analisis kesesuaian formulasi HIP BBN biodiesel*.
- Manurung, G., Siregar, Y. I., Syahza, A., Suwondo, Nofrizal, Mulono, A., & Mustofa, R. (2022). *Keberlanjutan dan Tantangan*.

Nur'utami, M. N., & Hidayat, R. (2016). Influences of IOD and ENSO to Indonesian Rainfall Variability: Role of Atmosphere-ocean Interaction in the Indo-pacific Sector. *Procedia Environmental Sciences*, 33, 196–203. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2016.03.070>

OPIS. (2026). *Indonesia Could Face Obstacles in Advancing Higher Biofuel Blends*.

Prayuningsih, I. G. A., Yudiaatmaja, F., & Suci, N. M. (2024). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Return on Assets, Loan to Deposit Rasio dan Biaya Operational Pendapatan Operational Terhadap Non-Performing Loan pada Bank Konvensional. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 424–430. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2355>

Rosida, I., Dalimunthe, G. P., & Prawiraatmadja, W. (2025). Strategic Roadmap for Biodiesel Market Leadership Using Analyze-Formulate-Implement Framework and Analytical Hierarchy Process in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(4), 2143–2154.

United States International Trade Commission. (2026). *Harmonized Tariff Schedule*. hts.usitc.gov

United States Trade Representative. (2026). *US-IDN ART Schedules 1 and 2*. <https://ustr.gov/about/policy-offices/press-office/press-releases/2026/february/ambassador-greer-issues-statement-president-trump-announcing-trade-deal-indonesia>

Widyatama, E. (2026). *Selat Hormuz Dibuka Pun Tak Cukup, Krisis Energi Masih Akan Panjang*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20260323141756-128-720892/selat-hormuz-dibuka-pun-tak-cukup-krisis-energi-masih-akan-panjang>

WMO. (2026). *ENSO neutral conditions expected as La Niña fades, but El Niño chances rise*.

World Bank. (2026). *World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)*. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Historical-Data-Monthly.xlsx>









www.iposs.co.id